



BALAI BUDAYA

RIWAYATMU DULU, KINI, DAN ESOK

NUNUS SUPARDI

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015



BALAI BUDAYA

RIWAYATMU DULU, KINI, DAN ESOK

Nunus Supardi

**Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015**

BALAI BUDAYA
RIWAYATMU DULU, KINI, DAN ESOK

Copyright@NunusSupardi, 2015

ISBN: 978-602-17669-9-6

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Balai Budaya dari depan. Posisi lantai gedung Balai Budaya tampak di bawah jalan. (Sumber:<http://membacaindonesia.blogspot.com/2011/06/mem-aca-balai-budaya-budaya-macam-apa.html>)

Sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam perjalanan sejarah kebudayaan setelah Indonesia merdeka, kehadiran Balai Budaya menjadi sangat penting. Balai Budaya adalah sebuah nama gedung yang terletak di Jln. Gereja Therasia No. 47, Menteng Jakarta. Gedung itu menjadi satu-satunya tempat berkumpul para seniman, budayawan, cendekiawan dan wartawan, untuk mulai memperbincangkan keindonesiaan kita di bidang kebudayaan di tahun 1950-an. Mereka berkumpul untuk berkarya, berpentas, berpameran, berdiskusi, belajar dan latihan seni.

Sejumlah seniman, budayawan, cendekiawan dan wartawan, bahkan ekonomon, ahli hukum, politisi pernah beraktivitas di gedung itu. Gedung yang bersejarah itu sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Selain bila turun hujan lebat air, meluap ke dalam gedung, pada beberapa bagian gedung telah mengalami kerusakan. Upaya merenovasi gedung tersebut mengalami kendala, karena status pemilikan yang belum jelas. Di pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, maupun dari pihak pengelola Balai Budaya, sama-sama tidak memiliki dokumen yang menjelaskan mengenai status gedung tersebut.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Sdr. Nunus Supardi akhirnya ditemukan data yang memberikan indikasi tentang asal-usul dari gedung tersebut. Semua temuan data dan informasi itu telah dirangkai dalam buku ini, mulai dari sumber dana pembelian, peresmian menjadi gedung Balai Budaya, dan perannya dalam memajukan kebudayaan bangsa.

Kami menyambut gembira, hasil penelitian itu. Selain akan menjadi sumber pengetahuan tentang sejarah dan peran BB, dari buku ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah status pemilikan dan penataannya ke depan.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sekretaris,

Nono Adya Supriyatno

Sambutan Ketua BKKI

Ketika Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) bulan Juli 2013 bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, disampaikan informasi tentang kondisi bangunan Balai Budaya yang memprihatinkan. Sebagai bangunan bersejarah patut untuk diselamatkan dari kerusakan yang semakin parah.

Menerima informasi tersebut, Pak Ahok menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ikut hadir untuk segera mengambil langkah penelitian dan penyelamatan. Untuk membantu menelusuri sejarah gedung tersebut, BKKI melalui Sdr. Nunus Supardi mulai melakukan penelusuran.

Dari hasil penelitiannya, ditemukan transkripsi pidato Moh. Yamin (Menteri PP dan K) yang mengisahkan tentang asal-usul uang yang digunakan membeli gedung tersebut. Dari data tersebut kini menjadi jelas bahwa hak milik ada pada Kemendikbud dan Balai Budaya memiliki hak pakai. Dengan data tersebut pihak Kemendikbud dapat mengambil langkah pengurusan status pemilikan dan pemeliharannya.

Semoga sumbangan tulisan ini ada manfaatnya.

Badan Kerja sama Kesenian Indonesia
Ketua

Drs. H. Suparmo

Pengantar Penulis

Dapat dibayangkan, betapa berartinya sebuah bangunan sederhana di Jln. Gereja Theresa 47, Menteng, Jakarta Pusat itu bagi para seniman, budayawan, penulis, dan filsuf seluruh Indonesia pada era 1950-1970-an. Bangunan yang diberi nama Balai Budaya (BB) itu disebut-sebut sebagai satu-satunya tempat mereka berkumpul. Seperti ditulis oleh Agus Darmawan T “...di tempat itulah para seniman dan budayawan berkumpul”.

Banyak orang mengakui, Balai Budaya berperan banyak dalam perjalanan sejarah kebudayaan Indonesia. Di bawah atap yang menaungi gedung BB itu, lahir ide-ide besar tentang keindonesiaan di bidang kebudayaan. Di situs dan gedung BB yang sederhana itu telah berlangsung polemik terlama, membahas tentang seperti apa kebudayaan Indonesia itu. Paling tidak polemik itu berlangsung sekitar lima belas tahunan, dimulai sejak berdirinya Lekra (1950) dan BMKN (1952) hingga pecah peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Sejumlah nama seniman, budayawan, cendekiawan dan kritikus besar Indonesia seperti Sutan Takdir Alisjahbana, HB Jassin, Trisno Soemardjo, Wiratmo Sukito, Sudjatmoko, Nashar, Zaini, Anas Ma'ruf, Intojo, Sanusi Pane, Armijn Pane, J.E. Tatengkeng, Achdiat Kartamihardja, Mochtar Lubis, Pramudya Ananta Toer,

Toto Sudarto Bachtiar, Ajip Rosidi, WS Rendra, Umar Khayam, Sapardi Djoko Damono, Hamsad Rangkuti, Sutardji Calzoum Bachri dan masih banyak lagi, pernah bersentuhan dengan BB. Mereka melakukan aktivitasnya di bidang masing-masing, termasuk melakukan perlawanan terhadap serangan dari kelompok kiri yang memusuhinya.

Kini, situs dan gedung BB yang bersejarah itu mulai dilupakan orang. Kondisi fisik bangunannya sangat memprihatinkan. Ada yang menulis, pada tahun 2010 gedung ini nampak seperti "rumah hantu kebudayaan" ketimbang sebuah tempat yang bersejarah. Bahkan Balai Budaya telah dianggap mirip dengan lukisan Piet Mondrian, seorang pelukis kelahiran Belanda yang hidup di tahun 1872-1944. Bukan karya lukisan yang sebenarnya, melainkan pemandangan yang merupakan gambaran betapa Balai Budaya menjadi sepi, bocor, tambal sulam, rusak dan hampir roboh.

Di *Kompas.com* 21 Januari 2015 diturunkan tulisan dengan judul "Balai Budaya Jakarta, Kawah Candradimuka yang Makin Tersisihkan". Berita itu kemudian disusul secara berturut-turut di harian *Kompas* 20 dan 22 Januari 2015. Diberitakan bahwa setiap kali banjir, air menerobos ke dalam gedung. Plafon bangunan jebol dan atap teras sayap kiri gedung nyaris ambruk dimakan umur. •

Masih disambung lagi, *Kompas* 23/1/2015 diberitakan bahwa sejumlah seniman berusaha memper-

tahankan BB sebagai ruang kreativitas seni dan budaya. Sambil menelusuri status kepemilikan, para seniman patungan dengan menyumbangkan lukisan agar memperoleh dana untuk membiayai kegiatan di tempat tersebut. • Sebelumnya, Alwi Shahab (2010) dalam sebuah terbitan telah menulis dengan judul “Balai Budaya Yang Merana”. Menurut Alwi, sebuah bangunan tua terasa kian terpengel oleh kantor megah di kiri kanannya.

Mengapa hal itu sampai terjadi? Hampir semua jawaban dari pertanyaan itu mengarah pada masalah ketidakjelasan status pemilikan gedung BB. Ada tiga pihak yang berkepentingan dengan Balai Budaya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda DKI Jakarta, dan Badan Pengelola Balai Budaya. Pihak Pemda DKI Jakarta dan Badan Pengelola sama-sama tidak memiliki bukti. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang banyak disebut orang sebagai pemilik, juga tidak memiliki bukti. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dikbud hasilnya nihil.

Akibatnya, masalah itu mengambang bertahun-tahun. Menjadi tidak jelas siapa yang harus membiayai pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut. Tidak jelas dari mana sumber dana didapat, sementara pihak Badan Pengelola tidak mampu mencari dana operasional dan pemeliharaan.

Pada tahun 2004, penulis sedang menghimpun data untuk penulisan sejarah Kongres Kebudayaan ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Berbagai terbitan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) termasuk laporan rapat dan majalah penulis foto kopi.

Di antara laporan dan majalah itu, ada majalah "Warta Kebudayaan" tahun 1954, dan "Laporan Rapat BMKN tahun 1954". Ketika akhir 2014 dan awal Januari 2015 masalah Balai Budaya mencuat lagi, penulis tergerak untuk menampilkan data status pemilikan Balai Budaya berdasarkan pada pernyataan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Moh. Yamin dan R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) yang dimuat di dalam dua terbitan tersebut. Baik Yamin maupun Gaos sama-sama menyatakan bahwa hak pemilikan Balai Budaya ada pada Kementerian PP dan K, sementara hak pakai ada pada BMKN/Balai Budaya. Bertolak dari pernyataan kedua tokoh itu, kini Kementerian Dikbud memiliki data yang dapat digunakan sebagai pijakan langkah untuk mengurus status pemilikan Balai Budaya.

Selain kondisi bangunannya memprihatinkan, banyak orang melupakan. Generasi muda tidak mengenal lagi sejarahnya. Dalam suatu berita ditulis dari seorang narasumber menyebutkan bahwa di zaman Bung Karno, Balai Budaya di bawah Departemen Sosial karena pada saat itu parpol banyak memiliki lembaga kebudayaan, yang pada 1950-an saling bersaing. Oleh Bung

Karno, dibuatkanlah yang namanya Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) supaya semua parpol yang punya lembaga kesenian/kebudayaan berkiprah di Balai Budaya. (Sumber: <http://www.koran-jakarta.com/?24051-napas-cinta-demokrasi>).

Penjelasan seperti itu tentu sangat menyesatkan orang, karena tidak sesuai dengan sejarah lahirnya BMKN maupun Balai Budaya. BMKN sebagai organisasi kebudayaan bukan dibuat oleh Bung Karno, tetapi lahir atas prakarsa para seniman, budayawan dan cendekiawan yang dicetuskan melalui Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung. Demikian pula mengenai status Balai Budaya juga bukan di bawah Departemen Sosial melainkan dibentuk dan bernaung di bawah BMKN. Departemen Sosial pernah memberikan bantuan ketika Balai Budaya diresmikan tahun 1954.

Buku ini ditulis untuk mendokumentasikan sejarah perjalanan Balai Budaya sebagai bagian dari BMKN, agar masyarakat memahami sejarahnya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk membantu menyibak tabir yang menyelimuti masalah status pemilikan gedung tersebut.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara-saudara: Ajip Rosidi, Suparmo, Sudarmadji Damais, Cak Kandar, Sri Warso Wahono, Aisul Yanto, Syahnagra Ismail, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, dll, yang telah banyak memberikan data dan informasi tentang BMKN/Balai Budaya. Secara khusus saya ucapkan terima kasih

kepada Bpk. Erry Riyana Hardjapamekas yang telah memberikan data berupa foto keluarga R. Gaos Hardjasoemantri.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini saya ucapkan terima kasih, terutama kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah menerbitkan buku ini. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Penulis,

Nunus Supardi



R. Gaos Hardjosoemantri, Ketua Badan Pekerja Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) dan Ketua Balai Budaya pertama, 1954-1965 (Sumber: koleksi Erry Riyana Hardjapamekas)

Daftar Isi:

Sambutan, hal. v dan vii

Pengantar Penulis, hal.viii

Bab I Pendahuluan, hal. 1

1.1 Latar belakang, hal. 1

1.2 Kondisi, hal. 2

1.3 Penyajian, hal. 6

Bab II Beberapa Gagasan Pembangunan Fasilitas
Kebudayaan, hal. 7

2.1 Lahirnya gagasan, hal. 8

2.2 Gagasan Wisma Seni Nasional, hal. 13

2.3 Realisasi gagasan, hal.15

Bab III Balai Budaya, Badan Musyawarat Kebuda-
yaan Nasional dan Pusat Kesenian Jakarta
Taman Ismail Marzuki, hal. 21

Bab IV Status Pemilikan, hal. 29

4.1 Beberapa pendapat, hal. 29

4.2. Pemilikan, hal.36

Bab V Langkah Penyelamatan, hal. 43

5.1. Pemakaian Balai Budaya, hal.43

5.2 Beberapa langkah penyelamatan, hal.47

Bab VI Bangunan Bersejarah, hal. 59

Bab VII Pengelolaan Balai Budaya hal. 83

Bab VIII Catatan Penutup, hal. 97

Lampiran

Daftar bacaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Budaya selanjutnya disingkat BB (Agus Darmawan mengakronimkan menjadi “Balbud”) adalah sebuah gedung yang sejak tahun 1954 difungsikan untuk menampung berbagai kegiatan kebudayaan. Gedung yang terletak di Jln. Gereja Theresia No. 47, Menteng, Jakarta Pusat itu bagi beberapa seniman, budayawan dan cendekiawan masih menjadi tempat favorit. Tetapi sebagian besar dari mereka sudah meninggalkannya. Apalagi generasi muda sekarang, sudah tidak mengenal lagi lokasi, nama, peran dan sejarah gedung tersebut.

Dapat dibayangkan, betapa berartinya sebuah bangunan sederhana itu bagi para seniman, budayawan, penulis, dan filsuf seluruh Indonesia pada era 1950-1970-an. Bangunan itu disebut-sebut sebagai satu-satunya tempat mereka berkumpul. Seperti ditulis oleh Agus Darmawan T “...*di tempat itulah para seniman dan budayawan berkumpul*”. Banyak orang mengakui, BB berjasa besar dalam membangun bangsa dan budaya Indonesia. Di bawah atap yang menaungi gedung BB itu, lahir ide-ide besar tentang keindonesiaan di bidang kebudayaan. Di situs dan gedung BB yang sering ke-

banjiran pernah itu berlangsung polemik terlama dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Mereka berdebat tentang keindonesiaan kebudayaan Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Paling tidak polemik itu berlangsung selama lima belas tahunan, dimulai sejak berdiri Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) tahun 1952 hingga pecah peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Sejumlah nama seniman, budayawan, cendekiawan dan kritikus besar Indonesia seperti Sutan Takdir Alisjahbana, HB Jassin, Trisno Soemardjo, Wiratmo Sukito, Sudjatmoko, Nashar, Zaini, Oesman Effendi, Hardi, Anas Ma'ruf, Sanusi Pane, Armijn Pane, J.E. Tatengkeng, Achdiat Kartamihardja, Mochtar Lubis, Pramudya Ananta Toer, Ajip Rosidi, WS Rendra, Umar Khayam, Sapardi Djoko Damono, Hamsad Rangkuti, dan masih banyak lagi, pernah bersentuhan dengan BB. Mereka melakukan aktivitasnya di bidang masing-masing, termasuk melakukan perlawanan terhadap serangan dari kelompok kiri (Lekra dkk) yang memusuhinya.

1.2 Kondisi

Kini, kondisi fisik bangunannya sangat memprihatinkan. Ada yang menulis, pada tahun 2010 gedung ini nampak seperti "rumah hantu kebudayaan" ketimbang sebuah tempat yang bersejarah. Bahkan BB telah dianggap mirip dengan lukisan Piet Mondrian, seorang pelukis kelahiran Belanda yang hidup di tahun 1872-1944. Bukan karya lukisan yang sebenarnya, melain-

kan pemandangan yang merupakan gambaran betapa BB sebagai tempat yang bersejarah dibiarkan merana.

Di *Kompas.com* 21/1/2015 diturunkan tulisan dengan judul “Balai Budaya Jakarta, Kawah Candra-dimuka yang Makin Tersisihkan”. Disusul secara berturut-turut di harian *Kompas* 20 dan 22 Januari 2015. Diberitakan bahwa setiap kali banjir, air menerobos ke dalam gedung. Plafon bangunan jebol dan atap teras sayap kiri gedung nyaris ambruk dimakan umur.

Masih disambung lagi, *Kompas* 23/1/2015 memberitakan bahwa sejumlah seniman berusaha mempertahankan BB sebagai ruang kreativitas seni budaya. Sambil menelusuri status kepemilikan, para seniman patungan dengan menyumbangkan lukisan agar memperoleh dana untuk membiayai kegiatan di tempat tersebut. Sebelumnya, Alwi Shahab (2010) dalam sebuah tulisan berjudul “Balai Budaya Yang Merana” menilai bahwa bangunan tua itu terasa kian terpengaruh oleh kantor megah di kiri kanannya.

Mengapa hal itu sampai terjadi? Hampir semua jawaban dari pertanyaan itu mengarah pada masalah ketidakjelasan status pemilikan gedung BB. Ada tiga pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan status BB, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda DKI Jakarta, dan Badan Pengelola BB. Pihak Pemda DKI Jakarta dan Badan Pengelola sama-sama tidak memiliki bukti. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang banyak disebut orang sebagai pemilik, juga tidak memiliki bukti. Dari penelusuran

yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dikbud hasilnya juga nihil. Masalah status pemilikan gedung BB jadi mengambang bertahun-tahun. Menjadi tidak jelas siapa yang harus membiayai pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut. Tidak jelas dari mana sumber dana didapat, sementara pihak Badan Pengelola merasa tidak mampu lagi mencari sendiri dana operasional dan pemeliharaannya.

Pada tahun 2004, penulis sedang menghimpun data untuk penulisan sejarah berlangsungnya Kongres Kebudayaan sesudah Indonesia merdeka yang ada di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Penulis mengkopi berbagai terbitan BMKN sebagai lembaga penyelenggara kongres. Termasuk terbitan-terbitan berupa laporan hasil rapat BMKN dan majalah yang diterbitkannya. Di antaranya adalah laporan “Rapat BMKN tahun 1954”, dan beberapa majalah sederhana (stensilan) yang diberi label “Warta Kebudayaan”.

Pada akhir 2014 dan awal 2015 berita tentang kerusakan gedung BB mencuat lagi. Disebut-sebut kerusakan itu disebabkan oleh status pemilikan BB yang tidak jelas. Selintas penulis teringat bahwa di dalam laporan “Rapat BMKN 1954”, dan majalah “Warta Kebudayaan” itu ditulis sedikit penjelasan tentang status pemilikan gedung tersebut. Ternyata benar, di dalam kedua terbitan itu tertulis pernyataan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Moh. Yamin dan R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)

yang menyebut tentang status gedung BB. Baik Yamin maupun Gaos sama-sama menyatakan bahwa hak pemilikan BB ada pada Kementerian PP dan K, sementara hak pakai ada pada BMKN/BB. Bertolak dari pernyataan kedua tokoh itu, menurut hemat penulis dapat digunakan sebagai pijakan langkah untuk mendudukkan mengenai status pemilikan BB.

Selain masalah kondisi bangunan BB yang memprihatinkan itu, ternyata banyak orang melupakan dan tidak mengenal BB. Banyak generasi muda tidak mengenal BB apalagi mengenai sejarahnya. Sebagai contoh, dalam suatu berita yang ditulis berdasarkan keterangan seorang narasumber disebutkan bahwa di zaman Bung Karno, BB di bawah Departemen Sosial. Lalu disebutkan pula bahwa BMKN dibuat oleh Bung Karno supaya semua parpol yang punya lembaga kesenian/kebudayaan berkiprah di Balai Budaya. (Sumber: <http://www.koran-jakarta.com/?24051-napas-cinta-demokrasi>).

Penjelasan seperti itu tentu sangat menyesatkan orang, karena tidak sesuai dengan sejarah lahirnya BMKN maupun BB. BMKN sebagai organisasi kebudayaan bukan dibuat oleh Bung Karno, tetapi atas prakarsa para seniman, budayawan dan cendekiawan melali Kongres Kebudayaan. Demikian pula mengenai status BB bukan di bawah Departemen Sosial melainkan dibentuk dan bernaung di bawah BMKN.

1.3 Penyajian

Berdasarkan pada hal-hal di atas maka penulis mencoba memaparkan segala hal yang berkaitan dengan keberadaan BB. Mulai dari awal diresmikan tanggal 14 April 1954 hingga saat ini. Secara berurutan dipaparkan mengenai munculnya berbagai cita-cita, kehendak dan gagasan para seniman, budayawan dan cendekiawan untuk memiliki gedung sebagai tempat beraktivitas (Bab II).

Selanjutnya, di dalam Bab III dipaparkan mengenai hubungan antara tiga lembaga yang sama-sama bergerak di bidang kebudayaan, yaitu BMKN, BB dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM). Berkaitan dengan masalah status pemilikan BB yang disebut-sebut sebagai pangkal masalah terlantarnya bangunan BB dipaparkan berbagai pendapat yang muncul kemudian disambung dengan ditemukannya dokumen yang menyebut tentang sumber dana pembelian gedung BB (Bab V). Sebagai pelengkap, berkenaan dengan masalah pengelolaan BB terutama dari sisi anggaran dan usaha-usaha penyelamatan BB, dipaparkan dalam Bab VI.

Pada Bab VII dipaparkan mengenai nilai sejarah yang dimiliki oleh BB berikut dengan berbagai data yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti terlihat dalam tabel pada lampiran. Sebelum paparan ditutup, di dalam Bab IX dipaparkan mengenai pengelolaan BB mulai dari diresmikan hingga sekarang.

BAB II

BEBERAPA GAGASAN PEMBANGUNAN FASILITAS KEBUDAYAAN

Gagasan untuk mendirikan fasilitas penunjang program pengembangan kebudayaan seperti BB sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Para seniman, budayawan dan cendekiawan mengusulkan adanya galeri, balai, teater, panggung terbuka, museum, taman, wisma, perpustakaan, dll. Meskipun pada saat itu sudah ada beberapa bangunan fasilitas kebudayaan tinggalan kolonial yang dapat dimanfaatkan, tetapi sebagai seniman merdeka berjiwa nasionalis, tetap memimpikan memiliki gedung buatan sendiri.

Waktu itu sudah ada gedung "*Schouwburg*" di Pasar Baru. Kini berganti menjadi Gedung Kesenian, untuk menggelar kegiatan seni pertunjukan. Selain itu juga sudah ada gedung "*Batavia Kunstkring*" di Menteng, yang antara lain untuk pameran seni rupa. Beberapa saat setelah kemerdekaan, gedung itu berfungsi sebagai kantor Madjlis Islam Alaa Indonesia (MIAI). Setelah itu dijadikan gedung Kantor Imigrasi. Kini, gedung itu malahan dijadikan restoran. Semula diberi nama Budha Bar Restaurant, tetapi karena nama itu diprotes oleh umat Budha, kemudian diganti namanya menjadi Tugu Kunstkring Paleis Restaurant.

Berbeda dengan nasib gedung “*Schouwburg*” dan “*Batavia Kunstkring*” yang masih dapat dipertahankan, nasib gedung “*Sociëteit Harmonie*” dan “*Sociëteit Concordia*” kini tinggal nama dan gambar saja. Kedua gedung yang berfungsi sebagai tempat orang-orang Belanda mencari hiburan seni pertunjukan itu, sudah dibongkar habis. Gedung “*Sociëteit Harmonie*” di dekat Istana Negara untuk perluasan jalan dan Kantor Sekretariat Negara. Sementara gedung “*Sociëteit Concordia*” di Lapangan Banteng dibongkar untuk kantor Kementerian Keuangan.

1.1 Lahirnya gagasan

Gagasan para seniman dan budayawan untuk memiliki gedung kebudayaan itu telah berkali-kali diutarakan kepada Pemerintah, melalui forum Kongres Kebudayaan (KK) I tahun 1948 di Magelang, 1951 di Bandung, 1954 di Surakarta serta dalam forum-forum lainnya. Para peserta selalu merekomendasikan agar pemerintah memperhatikan kehidupan kebudayaan termasuk menyediakan fasilitas bangunan untuk pengembangan kebudayaan bangsa.

Beberapa jenis fasilitas yang diusulkan dalam kongres itu, pertama adalah, “*agar pemerintah mengusahakan adanya Balai Budaya/Gedung Kesenian*”. Kedua, mengusulkan agar pemerintah “*mendirikan konservatori kesenian daerah*”. Ketiga, agar “*mendirikan museum, perpustakaan rakyat, laboratorium, taman-taman hiburan*”.

Usul keempat adalah, “*menjadikan tempat-tempat penciptaan dan tempat-tempat yang menyalurkan hasil-hasilnya secara luas dan merata dengan mengadakan sanggar-sanggar, museum-museum, gedung pertunjukan, balai-balai budaya, taman-taman kebudayaan*”. Karena semua usul itu belum juga terwujud, maka permintaan itu diulang lagi dalam kongres-kongres berikutnya. (Nunus Supardi, 2013: hal. 110)

Selain keinginan itu disampaikan melalui forum kongres, juga disampaikan oleh lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di masyarakat. Pada tanggal 31 Januari 1954, Masyarakat Seniman Jakarta Raya mengadakan rapat bersama Pemerintah Kotapraja Jakarta-Raya, Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), dan BMKN, membahas masalah pemenuhan kebutuhan fasilitas gedung untuk menampung kegiatan seniman.

Putusan dari rapat itu antara lain mendesak Pemerintah agar pada tahun itu juga dibangun “Gelanggang Kebudayaan”. Lokasi yang diusulkan amat strategis, yaitu di bekas *Wilhelmina Park* atau dikenal dengan nama Taman Wijayakusuma. Ternyata tempat itu diputuskan menjadi tempat berdirinya Mesjid Istiqlal.

Kompleks Gelanggang Kebudayaan yang diminta di tahun 1954 itu, sudah dirinci secara jelas komponen-komponen bangunan yang diperlukan. Pertama, sebuah bangunan yang berskala nasional yang disebutnya sebagai *Gedung Kebudayaan Nasional*. Di dalam gedung itu disediakan: (1) Ruang pertunjukan tonil,

drama, konser serta tempat-tempat latihan; (2) Ruang National Art Galery; (3) Ruang Pusat Perpustakaan Nasional; (4) Ruang Rapat dan Simposium; (5) Ruang pameran Seni Lukis dan Patung; dan (6) Ruang restoran.

Komponen bangunan kedua adalah *Teater Rakyat Terbuka (Volktheater)* untuk pertunjukan tari dan musik tradisional, dilengkapi dengan taman-taman tempat pameran seni lukis dan patung. Selain mengusulkan kedua komponen bangunan besar itu, juga mendesak “*agar Kotapraja Jakarta-Raya mempertahankan dan memperbaiki gedung Schouwburg yang ada di Pasar Baru, yang sekarang masih ada, menjadi Gedung Kesenian*”. Munculnya gagasan di awal kemerdekaan itu menunjukkan betapa besarnya semangat para seniman, budayawan dan cendekiawan dalam membangun keindonesiaan di bidang budaya.

Ada juga kelompok lain yang mengajukan keinginan yang sama, yaitu “Dewan Pekan Raya dan Exhibisi Indonesia Pusat (DEXIP)”. Dalam rapatnya tanggal 2/10/1956 yang dihadiri oleh wakil Jawatan Kebudayaan, Kementerian PP dan K, BMKN, Yayasan Turisme Indonesia, Ikatan Seni Tari Indonesia (ISTI) yang beralamat Jl. Kandang No. 5 Jakarta (salah satu siswanya adalah Prof. Dr. Edi Sedyawati), Akademi Teater Nasional, dll., menyepakati untuk meminta kepada pemerintah agar membangun “Gedung Pameran Kebudayaan” dan “Teater Nasional Indonesia”. Usul itu

mirip dengan yang diusulkan oleh Masyarakat Seniman Jakarta Raya.

Untuk mempercepat usul itu langsung dibentuk “Badan Koordinator Kebudayaan dan Kesenian” dan satunya lagi, “Badan Pelaksana Gedung-gedung Pameran dan Teater Nasional”. Yang ditunjuk sebagai ketua Badan Koordinator adalah Mr. Wongsonegoro. Adapun yang ditunjuk sebagai ketua Badan Pelaksana adalah J.M. Laihad (Warta Kebudayaan, 2/11/1956: hal.7).

Gagasan yang muncul baik melalui kongres maupun melalui forum rapat yang disuarakan oleh masyarakat seniman itu akhirnya didengar dan mendapatkan tanggapan dari Presiden Soekarno. Sebagai seorang presiden yang gemar melukis serta mengoleksi karya-karya seni rupa, Bung Karno mendorong usulan tersebut, dan meminta agar segera dirancang sebuah karya arsitektur berupa bangunan fasilitas kesenian. Terlebih lagi setelah Soekarno mengunjungi Museum Seni Lukis Trytyakovskaya tahun 1956 yang ada di Moskow. Menurut Yuke Ardhiati, Bung Karno sangat terkesan serta menginginkan adanya sebuah rancangan gedung yang disebut “*National Gallery of Art*” di Indonesia menyerupai Museum Seni Lukis Trytyakovskaya. Disebutkan bahwa lokasi *National Gallery of Art* yang berfungsi menyimpan karya lukisnya itu di lingkungan Tugu Nasional yang kemudian seluruh kawasan itu disebut Monumen Nasional (MONAS). Menurut konsep Bung Karno, bangunan-bangunan kebudayaan

di lapangan Merdeka dan daerah sekitarnya itu akan merupakan rangkaian berbagai kompleks, mulai dari Tugu Nasional, Masjid Istiqlal, Teater Nasional, Galeri Nasional, dan sebagainya. (Yuke Ardhiati 2005: hal. 122-126).

Perhatian Presiden Sukarno terhadap pembangunan fasilitas pengembangan kebudayaan dan ke-senian memang sangat besar. Ketika menghadiri Ulang Tahun Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia tanggal 16/4/1959 dengan tegas Bung Karno mengingatkan agar kita memperhatikan posisi kebudayaan/kesenian dalam pembangunan bangsa. Bung Karno menyatakan bahwa: *"...menghadapi pembangunan yang hebat, jangan lupa memasukkan hal kesenian di dalam pembangunan kita itu. Dan bukan saja kita masukkan kesenian sebagai salah satu obyek daripada pembangunan, tetapi kita masukkan kesenian juga di dalamnya kesenian itu sebagai satu alat pembangunan"* (Sumber: Arsip Nasional).

Dari sekilas gambaran itu menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia merdeka para seniman, budayawan dan cendekiawan sudah banyak menyampaikan gagasan tentang perlunya bangunan untuk menunjang pengembangan kebudayaan bangsa. Jenis dan nama bangunan yang diinginkan ternyata bermacam-macam. Ada yang menginginkan berdirinya "Balai Budaya/Gedung Kesenian", "Gelanggang Kebudayaan", "Gedung Kebudayaan Nasional", "Teater Rakyat Terbuka (*Volk-theater*)", "Gedung Pameran Kebudayaan", "Teater Nasi-

onal Indonesia”, dan “National Gallery of Art”, “Galeri Kesenian Nasional”, dan “Teater Nasional”. Usul itu tidak hanya disampaikan melalui berbagai forum seperti kongres atau konferensi, melainkan juga datang dari organisasi kebudayaan dan kesenian.

1.2 Gagasan Wisma Seni Nasional

Gagasan para seniman dan budayawan untuk mendirikan *National Theatre* dan *National Gallery of Art* serta berbagai fasilitas kebudayaan seperti disebut di atas, mendapatkan dukungan penuh dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pada tahun 1960 dikeluarkan TAP No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPPNSB) Tahapan Pertama 1961-1969, tanggal 3 Desember 1960. Di dalam GBPPNSB itu antara lain telah dicantumkan rencana dibangunnya “*Galeri Kesenian Nasional*” dengan kode proyek: AA.3. Sementara itu untuk pembangunan “*Theater Nasional*”, dicantumkan sebagai proyek cadangan. Karena situasi politik dan pemerintahan saat itu sedang tidak stabil, dan pada puncaknya pecah peristiwa G30S/PKI, semua rencana yang sudah ditetapkan dalam GBPPNSB gagal semuanya.

Setelah memasuki masa pembangunan nasional yang dimulai tahun 1969/1970 (PELITA I) rencana pembangunan fasilitas kebudayaan mulai disusun lagi. Pada tahun anggaran 1970/1971 mulai dibahas lagi persiapan pembangunan fasilitas kebudayaan yang ter-

tunda. Setelah diadakan rapat dan seminar, disepakati untuk membangun sebuah kompleks kebudayaan dengan nama "*Wisma Seni Nasional*" biasa disingkat WSN. Dalam satu kompleks itu di dalamnya terdiri atas tiga komponen bangunan inti dan beberapa bangunan penunjang. Adapun tiga bangunan yang ada di dalam WSN adalah bangunan Teater Nasional, Galeri Nasional dan Pusat Informasi Budaya.

Mengenai pemilihan lokasi pembangunan WSN di Jln. Medan Merdeka Timur, Jakarta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Tugu Nasional atau Monumen Nasional di lapangan IKADA. Di dalam rancangan awal penataan kawasan Monumen Nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen asli Rancangan Pendirian Wisma Nasional antara lain disebutkan bahwa Tugu Nasional berada di tengah-tengah lapangan Ikada. Adapun batas-batas adalah sebagai berikut: (1) Sebelah Utara, Jln. Medan Merdeka Utara; (2) Sebelah Timur, Jln. Medan Merdeka Timur; (3) Sebelah Selatan, Jln. Medan Merdeka Selatan; dan (4) Sebelah Barat, Jln. Medan Merdeka Barat.

Tugu Nasional menjadi „*landmark*“ atau „*point of interest*“, yang keberadaannya didukung oleh bangunan-bangunan monumental di sekitarnya. Bangunan-bangunan monumental yang dimaksud adalah: (1) Sebelah Utara, di Jln. Medan Merdeka Utara, terdapat bangunan Istana Negara dan Mesjid Istiqlal; (2) Sebelah Timur, di Jln. Medan Merdeka Timur, terdapat Gereja Emanuel dan Wisma Seni Nasional, dan sejumlah

bangunan tua; (3) Sebelah Selatan, di Jln. Medan Merdeka Selatan, terdapat Kantor Wakil Presiden RI, Kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perpustakaan Nasional dan sejumlah bangunan tua; dan (4) Sebelah Barat, di Jln. Medan Merdeka Barat, terdapat Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Museum Nasional. Selanjutnya, di sudut sebelah Barat Daya, di pertemuan Jln. Medan Merdeka Barat dan Jl. Medan Merdeka Selatan di ujung Jln. Thamrin dibangun pintu gerbang, menuju ke arah Stadion Utama (Gelora Bung Karno) dan kemudian ‘disambut’ oleh patung ‘*Selamat Datang*’ di Bundaran Hotel Indonesia.

Pada saat itu arsitek Ir. F. Silaban mengusulkan WSN ditempat daerah pinggiran (disebutnya daerah *green belt*) kota Jakarta. Usul itu disampaikan karena menurut Silaban untuk membangun WSN diperluas lahan yang luas. Diperlukan tanah seluas sekitar 40 ha, dan tanah seluas itu hanya di dapat di daerah *green belt*. Silaban mengatakan bahwa bangunan WSN di ibukota negara itu harus besar dan megah, membanggakan dan dapat menampung berbagai kegiatan memajukan kebudayaan bangsa.

1.3 Realisasi gagasan

Dari sekian banyak usulan itu yang pertama terwujud adalah “Balai Budaya” (diresmikan 14/4/ 1954), kemudian disusul “Taman Ismail Marzuki” (10/11/

1968), sebagai realisasi dari hasil rapat DEXIP, kemudian renovasi “Schouwburg” menjadi “Gedung Kesenian” (1987) atas usul Masyarakat Seniman Jakarta. Selain itu atas inisiatif masyarakat dan dunia usaha berdiri Bentara Budaya (milik *Kompas*), Galeri Kemang, Pasar Seni Ancol, Galeri Cemara, Teater Tanah Air Taman Mini Indonesia Indah, Teater Salihara, dll.

Sementara itu, Wisma Seni Nasional yang dirancang sejak tahun 1961 hingga kini belum terwujud. Izin lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Ali Sadikin tahun 1978 di Jln. Medan Merdeka Timur seluas 13 ha, hingga kini baru tercapai sekitar 3 ha. Di atas lahan itu kini berdiri “Galeri Nasional Indonesia” (GNI atau GALNAS). Teater Nasional dan Pusat Informasi Budaya hingga kini belum terwujud.

Dari paparan sekilas mengenai lahirnya berbagai gagasan dan realisasi dari gagasan itu menunjukkan betapa lambannya pemenuhan kebutuhan fasilitas untuk mengembangkan kebudayaan di Indonesia. Kalau gedung “*Sociëteit Harmonie*” dan “*Sociëteit Concordia*” harus dikorbankan untuk kepentingan nonkebudayaan, seharusnya penggantinya tidak harus menunggu lama.

Bandingkan dengan Singapura, yang pada tahun 1995 mulai merancang berdirinya gedung kesenian, tahun 2002 telah berdiri “*Explanade Theatre*”. Gedung yang lebih dikenal “Gedung Durian” itu berada di tepi pantai Marina di mulut Singapore River yang menjadi kebanggaan Singapura. Gedung di atas lahan seluas 6

ha itu memiliki ruang teater berkapasitas 2000 tempat duduk, dan ruang-ruang lainnya itu, hanya diperlukan waktu selama 7 tahun saja dengan biaya sebanyak S\$ 600.000.000.

Di gedung inilah pada 12 dan 13 Maret 2004, diselenggarakan pertunjukan drama I LAGA LIGO. Pertunjukan yang mengangkat cerita epos asli Bugis itu disutradarai oleh Robert Wilson, seorang sutradara kelas dunia dari AS. Setelah dari Singapura, pertunjukan dilanjutkan di Belanda, Prancis, Spanyol, Barcelona, Italia dan Amerika Serikat. Pertunjukan ini dinilai sangat berhasil dan banyak mendatangkan decak kagum para penonton.

Harian *Kompas* memberikan komentar, pertunjukan di Singapura itu merupakan *"tonggak sejarah baru teater Indonesia"*, dan sebagai *"proklamasi Indonesia memasuki pergaulan seni dunia"*. Disebut „tonggak baru“ karena untuk pertama kali Indonesia menggelar seni pertunjukan yang digali dari epos asli Indonesia dan dimainkan oleh seniman Indonesia. Selama ini pertunjukan teater dunia banyak menampilkan cerita-cerita dari India, Yunani atau Inggris.

Setelah pertunjukan selesai, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla menginginkan agar drama Bugis I Laga Ligo itu dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia. Tetapi keinginan itu sulit dipenuhi karena dihadapkan pada pertanyaan: *"Apa kita mampu membawanya ke Jakarta?"* *Apa ada gedung yang layak?"* (*Kompas*, 14/3/2004).

Pertanyaan itu dilontarkan bukan karena biaya untuk menyelenggarakan pertunjukan itu amat mahal, tetapi lebih ke masalah teknis. Untuk menyajikan pertunjukan yang spektakuler itu diperlukan teater yang memenuhi standar internasional khususnya untuk panggung (*stage*), tata-lampu (*lighting*), dan tatasuara (*sound-system*). Terhadap masalah teknis itu Robert Wilson memberikan penjelasan: *"Sayang, di Indonesia belum ada tempat yang representatif untuk mempergelarkan pertunjukan ini"*. (tayangan TPI, 24/3/2004)

Cerita masih berlanjut. Ketika rombongan penari bertemu dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara tanggal 6/9/2004, Presiden memberikan kesan kecewa. Presiden menyatakan: *"Saya betul-betul sakit hati, ketika saya ingin melihat pertunjukan I Laga Ligo sebelum dipentaskan ke mancanegara, muncul jawaban kalau mau nonton harus ke Singapura karena di Indonesia tidak ada teater yang secara teknis memiliki sound system yang dibutuhkan untuk mementaskan kesenian itu."* (Kompas, 7/9/2004)

Bila dibanding dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Rusia, Polandia, maka jumlah fasilitas kesenian yang ada di Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Di tingkat Asia, seperti dengan negara China, Jepang dan Korea Selatan juga masih tertinggal baik dari segi jumlah maupun dari segi skala. Negara-negara tersebut telah memiliki banyak gedung kesenian berskala internasional. Sebagai bandingan, berdasarkan data tahun 1984 yang

dikutip dari Arts Administration and Society ta-hun 1994, Jepang memiliki gedung pertunjukan dengan kapasitas tempat duduk antara 700-1000 orang sebanyak 1.344 buah, seperti terlihat dalam tabel 1.

Dari uraian di atas menunjukkan betapa masih tertinggalnya Indonesia dalam menyiapkan fasilitas kebudayaan khususnya di bidang kesenian dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ketertinggalan itu tidak hanya di Ibukota Negara, melainkan juga di daerah-daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa daerah memanfaatkan bangunan yang ada menjadi bangunan serba guna, karena dipergunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kegiatan kebudayaan.

Tabel 1
DATA JUMLAH GEDUNG PERTUNJUKAN DI JEPANG
(Data tahun 1984, dikutip dari Arts Administration and Society:1994)

No	PREFEC-TURE	JMLH	No	PREFEC-TURE	JMLH
1	2	3	1	2	3
01	Aichi	20	25	Miyazaki	17
02	Akita	11	26	Nagano	43
03	Aomori	38	27	Nagasaki	21
04	Chiba	20	28	Nara	14
05	Ehime	19	29	Niigata	28

06	Fukui	-	30	Oita	15
07	Fukuoka	54	31	Okayama	15
08	Fukushima	25	32	Okinawa	16
09	Gifu	31	33	Osaka	57
10	Gunma	29	34	Saga	13
11	Hiroshima	28	35	Saitama	61
12	Hokkaido	62	36	Shiga	22
13	Hyogo	46	37	Shimone	12
14	Ibaraki	30	38	Shizouka	72
15	Ishikawa	25	39	Tochigi	30
16	Iwate	18	40	Tokushima	9
17	Kagawa	11	41	Tokyo	110
18	Kagoshima	40	42	Tottori	6
19	Kanagawa	61	43	Toyama	18
20	Kochi	10	44	Wakayama	15
21	Kumamoto	19	45	Yamagata	20
22	Kyoto	26	46	Yamaguchi	22
23	Mie	21	47	Yamanashi	10
24	Myagi	17	48	-	-
				JUMLAH	1.344*)

*) Kapasitas tempat duduk antara 700 – 2500 orang.

BAB III

BALAI BUDAYA, BADAN MUSYAWARAT KEBUDAYAAN NASIONAL, DAN PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI

Ketiga lembaga, yaitu BB, BMKN dan Pusat Kesenian Jakarta atau Taman Ismail Mazuki (TIM) mempunyai kaitan sejarah. Secara singkat dapat dipaparkan bahwa BMKN adalah sebuah organisasi kebudayaan yang lahir di awal Indonesia merdeka. Organisasi ini dibentuk berdasarkan rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung yang kemudian pembentukannya difinalkan pada Konferensi Kebudayaan Indonesia tahun 1952.

Sebenarnya pada saat itu sudah berdiri organisasi kebudayaan yang lain, yaitu Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Pembentukan lembaga ini merupakan realisasi dari rekomendasi KK 1948 di Magelang atas prakarsa Armijn Pane, Sunarjo Kolopaking, Sanjata Vidjaja dan Wongsonegoro. LKI yang berdiri sejak 1 Januari 1949 dengan pimpinan Mr. Wongsonegoro dan wakil ketua Dr. Bahder Djohan diresmikan setahun kemudian, yaitu pada tanggal 9 Maret 1950.

Tertundanya peresmian LKI disebabkan oleh situasi keamanan negara tidak memungkinkan. Pusat

pemerintahan RI yang sedang hijrah ke Yogyakarta digempur oleh tentara Belanda. Terjadilah pertempuran sengit tentara nasional melawan Belanda, sehingga banyak korban. Selain mempertahankan kemerdekaan melalui perang gerilya juga dilakukan perang diplomasi, melalui berbagai perundingan. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI. Tahun 1950 pusat pemerintahan baru kembali ke Jakarta.

Setahun setelah LKI diresmikan, tahun 1951 LKI sudah mampu menyelenggarakan KK lagi di Bandung. Pada kongres ini peserta menghendaki adanya sebuah organisasi baru bukan dalam bentuk “lembaga” tetapi sebuah “badan”. Disepakati dibentuk BMKN. Karena sampai dengan ditutupnya kongres belum menghasilkan kesepakatan mengenai susunan dan nama anggota pengurus serta Anggaran Dasar (AD) maka disepakati Panitia Kesimpulan (Tim Perumus) mengadakan sidang lanjutan di Jakarta.

Sidang lanjutan dilaksanakan tanggal 9 Desember 1951, dihadiri 6 orang, yakni: Ki Mangunsarkoro, Dr. Murdowo, Moh. Said, M. Nasution, Dr. Bahder Djohan, (Ketua LKI), Mr. Moh. Sjah, dan Gaos Hardja-soemantri. Anggota Panitia Kesimpulan yang tidak hadir adalah Hamka (berhalangan), Suratno Sastroamidjojo (sakit) dan Mr. Kuntjoro Purbopranoto (berada di Luar Negeri). Dari Sekretariat LKI sebagai pencatat (notulis) adalah Sarwedi Sosrosudigdo dan Murasad.

Panitia Kesimpulan berhasil menyusun rancangan (draft) kesimpulan berupa susunan organisasi dan AD BMKN. Rancangan itu dibawa ke sidang Konferensi Kebudayaan untuk mendapatkan persetujuan. Pada tanggal 12-14 April 1952 diselenggarakan Konferensi Kebudayaan Indonesia dengan peserta antara lain dari perseorangan dan organisasi. Peserta dari organisasi antara lain adalah: LKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI Jogyakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongker-Werun Minahasa, Yayasan Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Rakyat Suara Timur Padang dan lebih dari 120 organisasi kesenian dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Timur, dan Kalimantan.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung, pada tanggal 14 April 1952 peserta konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya *Badan Musjawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)*. Dalam Akte Notaris dan kop surat yang dikeluarkan oleh BMKN ditulis "musjawarat", tetapi dalam papan nama ditulis "musawarat". Ajip Rosidi dalam bukunya "Mengenang Hidup Orang Lain" secara konsisten menulis "Musawarat". Setelah diberlakukan pemakaian Ejaan Yang Disempurnakan Tahun 1972, kata diganti menjadi "musyawarat".

Dengan berdirinya badan baru itu, pada tanggal 12 Mei 1952 LKI sebagai organisasi yang lebih dulu lahir mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Badan baru itu dalam memulai aktivitasnya menggunakan pegawai, kantor sekretariat, perlengkapan dan keuangan yang dimiliki LKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri PP dan K.

Keanggotaan BMKN secara perseorangan lebih banyak datang dari kota Jakarta. Mereka adalah para intelektual terkemuka, penulis, jurnalis, sastrawan, pelukis, para dokter, ahli hukum, serta musisi. BMKN lebih merupakan sebuah organisasi dengan anggota terdiri atas kelompok pribadi dan organisasi yang beraneka ragam. Di dalam AD perhatian BMKN lebih dipusatkan pada bidang kebudayaan, seni dan ilmu pengetahuan.

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengajukan permohonan penetapan sebagai badan hukum. Dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. J.A.5/109/10, usul pembentukan BMKN beserta Anggaran Dasar (AD), disahkan dan BMKN diakui sebagai lembaga yang berbadan hukum. Setelah BMKN resmi berdiri dan memulai aktivitasnya, langkah yang dilakukan merealisasikan kebutuhan fasilitas gedung untuk menampung kegiatan-kegiatan BMKN. Seperti telah dipaparkan di dalam Bab I, salah satu fasilitas yang diusulkan oleh budayawan-seniman dalam KK tahun 1948 di Magelang dan diulang lagi dalam KK 1951 di Bandung adalah berdirinya

“Balai Budaya”. Atas usaha Gaos Hardjasoemantri selaku Ketua Badan Pekerja BMKN, didapatkan gedung di Jln. Sunda No. 47, atau sekarang Jln. Gereja Theresia.

Nama “Balai Budaya” itu diputuskan dalam Rapat BMKN ketiga belas, yang berlangsung tanggal 15 dan 16 Desember 1953. Bunyi lengkap keputusan itu adalah sebagai berikut: “*Diputuskan pula memberi nama ‘BALAI BUDAYA’ kepada Gedung tersebut*” (Warta Kebudayaan, 1954). Nama itu sesuai dengan rekomendasi KK 1948 di Magelang dan 1951 di Bandung.

Berdirinya BB diresmikan oleh Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin pada tanggal 14 April 1954, bertepatan dengan peringatan Ulang Tahun kedua BMKN. Dengan berdirinya BB berbagai kegiatan yang dikordinasikan oleh BMKN diselenggarakan di gedung BB. Meskipun gedung itu kalau dilihat dari kaca mata sekarang tergolong sangat sederhana, namun pada zamannya menjadi dambaan banyak seniman dan budayawan untuk dapat tampil di dalamnya. Gedung BB menjadi satu-satunya gedung yang banyak didatangi orang.

Tentang kesederhanaan gedung itu diakui oleh Moh Yamin ketika menyampaikan pidato peresmian BB tanggal 14 April 1954. Bahkan disebutkan gedung itu dulunya adalah sebuah kandang kuda. Yamin berjanji akan membangun gedung baru yang lebih luas. Janji Moh. Yamin sampai akhir masa jabatannya belum sempat terwujud. Sementara itu, kebudayaan dan

kesenian di Ibukota telah berkembang demikian pesat, sehingga sangat diperlukan bangunan baru yang lebih luas dan modern.

Dilihat dari segi bentuk arsitektur, dibandingkan dengan gedung-gedung bersejarah yang ada di Jakarta seperti Museum Nasional, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Fatahillah, Museum Wayang dll. tinggalan Belanda, bentuk bangunan BB sangat tidak sebanding. Menurut seorang arsitek, sulit menentukan gaya arsitektur bangunan BB. Tetapi di balik kesederhanaan gaya bangunan telah berlangsung berbagai peristiwa yang patut dijadikan catatan sejarah kebudayaan dan kesenian Indonesia. Lokasi berdirinya BB telah menjadi situs bersejarah.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah dan aktivitas seniman saat itu semakin meningkat. Volume gedung BB dirasakan kurang memadai untuk berekspresi. Muncullah gagasan dari sejumlah seniman yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Ali Sadikin. Kesan yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Ali Sadikin ketika meresmikan purnapugar gedung BB dari dana bantuan Pemda DKI tahun 1968. Bang Ali melihat BB sebagai satu-satunya wadah para seniman Indonesia di Jakarta, dinilai tidak cukup lagi untuk menampung aktivitas seniman, budayawan dan cendekiawan untuk beraktivitas menuangkan gagasan dan karya seninya. Diperlukan bangunan baru yang lebih

besar dan mampu untuk menampung berbagai kegiatan seni dan budaya secara lebih luas.

Untuk mewujudkan hasil karya seni para seniman Indonesia di DKI Jakarta, para seniman “dikumpulkan” di sebuah tempat dengan satu tujuan, memajukan seni dan kebudayaan Indonesia. Bang Ali lantas memerintahkan stafnya untuk mencari sebuah kawasan yang ideal sebagai Pusat Kesenian Jakarta. Akhirnya, ditemukan sebuah areal di Jln. Cikini No. 73, Jakarta. Setelah tempat ditemukan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada seniman untuk memikirkan perencanaan dan konsep selanjutnya.

Pada periode 1968 itu secara intens terjadi pertukaran pikiran soal seni dan budaya di kantor Harian KAMI, tempat Goenawan Mohamad bekerja. Kantor itu biasa disinggahi seniman dan budayawan, serta aktivis Angkatan 66. Pertemuan juga dilangsungkan di pondokan Salim Said (wartawan Angkatan Bersenjata) Jl. Matraman Raya No. 51. Tempat itu sering dijadikan tempat nongkrong Arifin C. Noer (wartawan di Pelopor Baru), Goenawan Mohamad dan Ed Zulverdi (keduanya wartawan di harian KAMI) dan juga Sukardjasman (wartawan Sinar Harapan).

Saat itu, konsep pembangunan pusat kesenian yang diminta Ali Sadikin itu semuanya diketik oleh Arifin C. Noer di kamar kerja Salim Said. Hasilnya diserahkan oleh Christianto Wibisono kepada Bang Ali. Akhirnya tanggal 10 November 1968, di sebuah tempat seluas kurang lebih 8 hektar, yang sebelumnya ber-

nama Taman Raden Saleh dan kemudian dijadikan Kebun Binatang Cikini akhirnya menjadi sejarah sebuah gedung pusat kesenian. Inilah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Lokasi Kebun Binatang dipindahkan ke tempat baru, di Ragunan, Pasar Minggu. Pertimbangan lain dibangunnya Pusat Kesenian Jakarta, karena tempat nongkrongnya seniman di Pasar Senen tak bisa dipakai lagi, karena perpecahan ideologi politik. Sejak itu seniman pun kehilangan tempat “pertemuan”. (http://www.kompasiana.com/ajinatha/kenapa-bangali-mendi-rikan-taman-ismail-marzuki-tim_55009ef7a33311f6f511996)

Berdirinya Pusat Kesenian Jakarta yang didirikan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, diresmikan pada 10 November 1968. Untuk menghormati seniman kelahiran Betawi, Pusat Kesenian itu diberi nama Taman Ismail Marzuki disingkat TIM. Kehadirannya telah menjadi “sentrum” baru bagi para seniman, budayawan dan cendekiawan, setelah BB. TIM telah menjadi “barometer” baru, tidak hanya bagi insan kreatif yang berdomisil di Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia. Antara tiga lembaga tersebut, yaitu BB, BMKN, dan TIM mempunyai hubungan sejarah. BB didirikan oleh BMKN dan TIM didirikan sebagai pengembangan keberadaan BB yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Antara BB dengan TIM memiliki kedekatan fungsi dan misi, dan oleh karena itu kegiatan kebudayaan/kesenian dapat diselenggarakan di dua tempat itu.

BAB IV

STATUS PEMILIKAN

Sebagaimana dipaparkan di pendahuluan, sampai saat ini masalah status pemilikan menjadi kata kunci untuk mengurai masalah keterlantaran gedung BB. Selain itu, ketidakjelasan status juga mengundang berbagai pendapat masyarakat tentang siapa sebenarnya pemilik sah dari gedung tersebut. Permasalahan itu berlarur-larut terus sampai ditemukan dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk mengurus statusnya.

Dari hasil penelusuran yang pernah dilakukan tahun 1994 dan 2013 yang lalu, selalu tidak membuahkan hasil. Beberapa tahun lalu (2004) penulis menemukan dokumen, berupa “transkripsi” pidato Mr. Moh. Yamin selaku Menteri PP dan K ketika meresmikan berdirinya BB pada tanggal 14 April 1954. Selain itu juga ada lagi satu dokumen berupa kutipan pidato laporan R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja BMKN pada acara peresmian gedung BB tersebut.

Kedua dokumen itu di dalamnya memuat keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik sah gedung BB. Dengan adanya dokumen itu maka pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat melangkah untuk mengurus pemutihan statusnya.

4.1 Beberapa pendapat

Pendapat tentang BB dibedakan atas dua macam. Pertama pendapat tentang status pemilikan, dan kedua tentang kondisi gedung. Kunci yang membuat ketidakjelasan mengenai status pemilikan BB adalah tidak ada atau belum ditemukannya dokumen resmi dan tertulis tentang gedung BB. Tentang hak pemakaian “tanpa batas waktu” kepada BB tanpa dilengkapi dengan dokumen penyerahan atau perjanjian. Demikian pula halnya dengan bukti-bukti pembelian gedung dalam bentuk kuitansi atau akte jual beli antara BMKN dengan pemilik gedung (penjual) juga tidak atau belum ditemukan.

Kesemuanya itulah yang menyebabkan dalam perkembangan selanjutnya memunculkan berbagai pendapat. Di satu pihak menyatakan bahwa: “*klaim bahwa Balai Budaya merupakan aset milik pemerintah pusat tidak dapat dibantah*”. Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat” itu sangat jelas, yaitu Kementerian PP dan K yang kini berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya, pihak Kementerian Dikbud tidak memiliki bukti selain yang tertulis dalam notula rapat BMKN dan yang ditulis dalam majalah Warta Kebudayaan.

Sementara itu kalau menurut Bambang Bujono (mantan anggota staf redaksi majalah sastra Horison), yang pernah berkantor di BB menyatakan bahwa “*gedung BB di Jln. Gereja Theresia 47 tidak didirikan*

pemerintah, tetapi dibeli BMKN pada 1951". Pendapat itu didasarkan pada keterangan Trisno Soemardjo, salah satu ketua BMKN yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Kesenian Jakarta pertama. Menurut Trisno *"...dulu gedung itu (BB) adalah tempat kegiatan dan hiburan orang-orang Menteng yang pada 1950 tidak lagi aktif. Kemudian gedung dibeli BMKN pada 1951. Masalahnya, sekarang semua anggota BMKN sudah meninggal dan surat kepemilikan Balai Budaya tidak jelas entah di mana"*.

Masih menurut Bambang Bujono, karena BMKN telah puluhan tahun mengelola gedung itu ("tanpa batas waktu": penulis) maka BMKN merasa memiliki. Masalahnya sekarang, BMKN yang menjadi induk BB mulai tahun 1965 mengalami kemunduran dan kemudian bubar dengan sendirinya. Kenyataan ini juga menambah makin rumitnya masalah status pemilikan.

Sementara itu, Agus Dermawan T memberikan penjelasan lain mengenai pendiri dan berdirinya BMKN dan kaitannya dengan kehadiran gedung BB. Menurut pemerhati seni rupa itu, BB didirikan oleh pemerintah pada 1954, yang kemudian dikelola BMKN. Dengan demikian posisi BMKN adalah sebagai pengelola, atau sebagai "pemakai".

Pendapat lain datang dari pelukis Aisul Yanto, yang sekarang membantu Cak Kandar mengelola BB. Aisul menyatakan bahwa: *"Selama ini negara tidak hadir di sini. Ke depan, negara mesti merawat dan memfasilitasi Balai Budaya. Sekarang kami mengusahakan agar*

kegiatan di tempat ini tidak kosong sehingga kami bisa membayar listrik, mengganti lampu, membersihkan, dan mengurus surat-menyurat”.

Dalam kenyataan, selama ini pihak pemerintah baik Pusat maupun Daerah (DKI Jakarta) tidak pernah mengurus keberadaan BB. Pemberian subsidi kepada BB seperti yang disampaikan oleh Moh. Yamin pada pidato peresmian BB, tampaknya berhenti setelah pelarangan Manifes Kebudayaan. Para penanda tangan Manifes itu kebanyakan adalah pengurus dan anggota BMKN. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola BB sendiri hanya sebatas bagaimana dapat memutar roda aktivitas BB. Tidak sampai pada masalah status pemilikan dan perawatan gedung. Dalam memutar roda aktivitas BB pihak pengelola mengalami kesulitan dalam hal anggaran belanja. Sehingga keadaan BB seperti ditulis oleh Kompas.com: *“Praktis dalam 17 tahun terakhir Balai Budaya sepi acara. Hanya segelintir perupa yang masih memanfaatkannya”.*

Dari pihak Pemda DKI Jakarta, seperti dinyatakan oleh Kepala Seksi Cagar Budaya Sejarah dan Permuseum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Rus Suharto, pengurusan berpegang pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. D.4-6098/d/33/1975. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa BB di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat termasuk dalam lingkungan pemugaran golongan C. Dengan penetapan itu, BB masuk kategori kawasan cagar budaya yang tidak boleh dirombak total. (*Kompas*, (21/1/2014).

Adapun mengenai statusnya Rus Suharto menyatakan bahwa *“Balai Budaya merupakan aset pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kebudayaan. Dulu digunakan untuk aktivitas BMKN”*. Sementara itu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sendiri mengatakan *“tidak tahu-menahu tentang status bangunan Balai Budaya. Tempat itu belum tercatat sebagai bangunan cagar budaya”*. (Kompas.com, 21/1/2015).

Masih mengenai status pemilikan, menurut Asiantoro (Disparbud DKI Jakarta) status kepemilikan Balai Budaya saat ini adalah milik negara, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Sumber: <https://www.Selasar.com/budaya/balai-budaya-ja-karta-kini-terlantar>). Untuk menelusuri sejarah BB, Pemda DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi di Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta. Mencari status BB menjadi penting karena kalau tidak ada kejelasan, Pemda DKI tidak merenovasi atau memfasilitasi BB.

Rapat berikutnya diselenggarakan Kantor Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta di Jati Petamburan, Jakarta, pada tanggal 30 April 2015. Hadir dalam rapat tersebut wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta wakil dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam rapat ini penulis menjelaskan adanya dua sumber yang menyebutkan bahwa tanah dan gedung BB hak pemilikannya ada pada Kementerian PP dan K, dan BMKN/BB memiliki hak pakai. Sebagai Pengelola BB sejak 1998 Abas Alibasjah juga

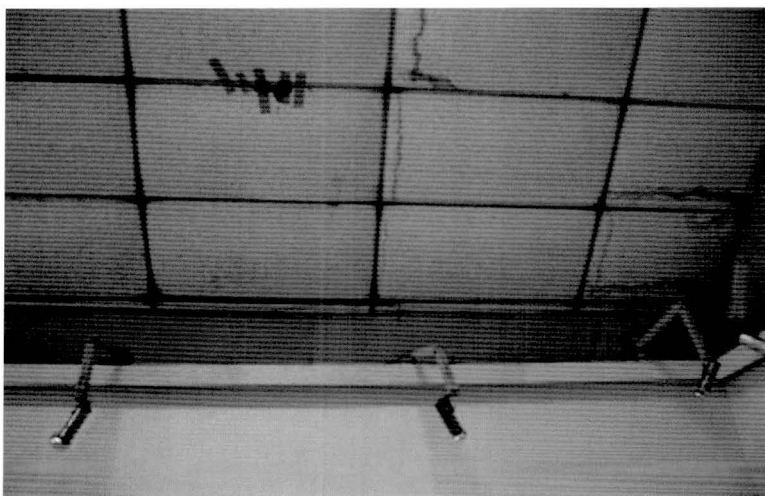
mengakui BB milik Kementerian PP dan K. (*Kompas*, 14/8/2015).

Mengenai kondisi gedung, pada umumnya memprihatinkan kondisi gedung yang termasuk bangunan bersejarah itu. Di *Kompas.com* 21 Januari 2015 diturunkan tulisan dengan judul “Balai Budaya Jakarta, Kawah Candradimuka yang Makin Tersisihkan”. Berita itu kemudian disusul secara berturut-turut di harian *Kompas* 20 dan 22 Januari 2015. Diberitakan bahwa setiap kali banjir, air menerobos ke dalam gedung. Plafon bangunan jebol dan atap teras sayap kiri gedung nyaris ambruk dimakan umur.

Masih disambung lagi, *Kompas* 23/1/2015 diberitakan bahwa sejumlah seniman berusaha mempertahankan BB sebagai ruang kreativitas seni budaya. Sambil menelusuri status kepemilikan, para seniman patungan dengan menyumbangkan lukisan agar memperoleh dana untuk membiayai kegiatan di tempat tersebut. Sebelumnya, Alwi Shahab (2010) dalam sebuah tulisannya dengan judul “Balai Budaya Yang Merana” sangat perihatin dengan kondisi gedung BB. Menurut Alwi, sebuah bangunan tua terasa kian terpercil oleh kantor megah di kiri kanannya (Sumber: <https://alwishahab.wordpress.com/2008/07/21>).

Dari sekian tulisan dan komentar tentang kondisi BB sekarang, paling menarik adalah catatan yang dimuat dalam sebuah situs dengan judul “PIET MONDRIAN DI BALAI BUDAYA@2010”. Yang dimaksud oleh pemilik situs, setelah menyaksikan kondisi BB

saat itu, sampailah pada kesimpulan bahwa Balai Budaya kondisinya mirip sekali dengan lukisan karya Pelukis Piet Mondrian. Ia adalah seorang pelukis kelahiran Belanda yang hidup di tahun 1872-1944. Suatu gambaran betapa buruknya gedung BB sebagai tempat yang bersejarah setelah ditinggalkan dan tidak mendapat perhatian.



Contoh : Piet Mondrian 1 berjudul: "Lampu Mati, Atap Bocor, Solusi Lakban dan Kebudayaan"

Oleh pemilik situs masing-masing "karya Piet Mondrian" itu diberi judul menggelitik. Antara lain diberi judul: "Piet Mondrian 1 "Lampu Mati, Atap Bocor, Solusi Lakban dan Kebudayaan"; Piet Mondrian 2 "Solusi Lakban, Kebudayaan Darurat"; Piet Mondrian 3 "Atap

Bocor dan Jajaran Lampu Mati"; Piet Mondrian 4 "Atap Retak dan Kematian Lampu"; Piet Mondrian 6 "Dialog dari Masa Lalu, Kesaksian Lampu dan Kipas Angin". Ada lagi yang diberi judul yang cukup menggelitik seperti "Toilet Kebudayaan", "rumah hantu kebudayaan", "Rumah pelukis besar Affandi" dan "Selamat datang kepada masa lalu". (Sumber: <http://membaca-indonesia.blogspot.com/2011/06/membaca-balai-budaya-budaya-macam-apa.html>)

Dari gambaran sekilas di atas, telah menunjukkan adanya beberapa pendapat mengenai status kepemilikan gedung BB. Pertama, ada yang menyatakan disubsidi Kementerian PP dan K berarti hak kepemilikan ada pada Kementerian Dikbud. Kedua, mengenai kewenangan hak pakai ada pada BMKN/BB. Ketiga, gedung tersebut dibeli oleh BMKN. Keempat, BMKN merasa memiliki karena dapat memakai gedung tersebut "tanpa ada batas waktu".

Mengenai kondisi gedung BB yang cenderung dibiarkan rusak masyarakat sangat menyayangkan hal seperti itu terjadi. Dalam perjalanannya selama 60 tahun lebih, di bawah atap gedung BB itu telah berlangsung berbagai peristiwa budaya yang sarat dengan nilai sejarah. Oleh karena itu mereka menilai penting untuk melakukan langkah penyelamatan, agar gedung bersejarah itu tidak rusak parah dan kemudian musnah.

4.2 Siapa pemiliknya?

Salah satu kebutuhan yang dirasakan mendesak oleh BMKN saat itu adalah fasilitas gedung yang dapat digunakan untuk operasional kegiatan BMKN. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan dana untuk membelinya? Kesulitan itu akhirnya dapat diatasi setelah mendapat subsidi dari Kementerian PP dan K, digunakan untuk gedung di Jln. Sunda No. 47.

Pertanyaan yang kini muncul adalah bagaimana status pemilikan gedung yang kemudian dikenal sebagai gedung BB itu? Gedung itu milik siapa? Mengapa statusnya menjadi tidak jelas? Untuk mencari jawab atas pertanyaan itu, telah dilakukan berbagai usaha. Tahun 1994 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pernah mengadakan penelusuran mengenai status kepemilikannya. Ada tiga instansi yang didatangi, yaitu pertama Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) yang masih dalam lingkungan sendiri dan mempunyai tugas mengurus seluruh aset departemen. Kedua, mendatangi Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang mengurus bangunan, dan pertanahan. Ketiga, adalah pengelola gedung BB.

Dari ketiga instansi itu tidak ditemukan dokumen yang berkaitan dengan gedung BB. Dari pihak pengelola gedung BB hanya menjelaskan bahwa sepengetahuannya gedung BB dibeli dari dana Kementerian PP dan K. Hanya berupa keterangan lisan, tanpa ada bukti. Sementara pihak Biro Perlengkapan Depdikbud maupun Bagian Perlengkapan Direktorat Jen-

deral Kebudayaan (Ditjenbud) sama sekali tidak memiliki data. Upaya penelusuran pun berhenti.

Pada tahun 2013 Ditjen Kebudayaan mencoba lagi melakukan pengumpulan data mengenai status kepemilikannya. Dari penelusuran itu juga tidak berhasil menemukan data yang dapat dijadikan sebagai acuan. Dari pihak Pemda DKI hanya dapat menunjukkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dibayar oleh BMKN/BB. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi dari pengelola, yaitu Bpk. Abas Alibasjah sebagai Ketua “Tim 5” tidak berhasil.

Pada tahun 2004, ketika penulis mencari data tentang penyelenggaraan Kongres Kebudayaan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin kompleks Pusat Kesenian Taman Ismail Mazuki (TIM) mengkopii beberapa majalah Warta Kebudayaan dan Laporan BMKN yang diterbitkan oleh BMKN. Ternyata di antara dokumen itu “ditemukan” tulisan yang menyebut tentang sumber dana pembelian gedung BB. Ada dua sumber yang mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengambil sikap terhadap status dan nasib gedung tersebut. Pertama adalah buku tipis (27 halaman) yang merupakan Laporan Untuk Rapat Umum BMKN tahun 1954 di Surakarta. Kedua, majalah berjudul “Warta Kebudayaan” terbitan BMKN tahun 1954 juga.

Sumber pertama dalam Laporan Rapat BMKN yang diselenggarakan tanggal 18 dan 19 September 1953 pada huruf d ditulis *“Menerima laporan Ketua Badan Pekerja (BMKN) mengenai usaha pembelian*

gedung di Jl. Sunda No. 47 Jakarta dan diputuskan: (1) menerima sebagai subsidi dari Kementerian PP dan K uang sebanyak Rp. 100.000,- guna pembelian, perbaikan dan perlengkapan gedung tersebut, yang; (2) hak-milikinya ada pada Kementerian PP dan K, sedang hak pemakaiannya ada di tangan BMKN". (Laporan BMKN, 31/7/1954 hal. 9).

Sumber kedua, di dalam majalah BMKN yang berjudul *Warta Kebudayaan* tanggal 14 April 1954. Dalam majalah itu secara khusus diberitakan tentang acara peringatan ulang tahun kedua BMKN, bersamaan dengan peresmian berdirinya Balai Budaya. BMKN berdiri pada 14 April 1952 sebagai realisasi dari hasil Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung. Acara itu dihadiri oleh Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin dan sejumlah seniman dan budayawan.

Dalam acara itu secara jelas disebutkan oleh Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja BMKN, bahwa "*Berkat bantuan Kementerian PP dan K tersebut yang memberikan subsidi untuk membeli dan memperbaiki gedung ini...*" (*Warta Kebudayaan*, 1954: hal. 7) Selanjutnya dijelaskan bahwa bantuan juga datang dari Kementerian Penerangan untuk pemasangan aliran listrik beserta lampu-lampunya. Ketiga bantuan datang dari Kementerian Sosial membantu peralatan kantor, seperti meja, kursi, almari, air dll. (*Warta Kebudayaan* 1954: hal. 5 dan 7).

Dalam pidato peresmian itu Yamin juga menyinggung bahwa dana subsidi dari Kementerian PP dan K

itu digunakan untuk membeli gedung BB. Antara lain Yamin mengatakan: “*Memang bantuan yang dapat diberikan kepada gedung Balai Budaya ini pada mulanya tidaklah seberapa besar...*”. Ditambahkan pula bahwa pemilihan gedung di Jln. Sunda 47 itu dirintis oleh Gaos Hardjasoemantri sejak tahun 1951. Selain Yamin menjelaskan latar belakang subsidi, juga menyelipkan janji untuk menjadikan “*gedung kesenian yang baru*” karena bangunan yang diresmikannya itu dinilai terlalu sederhana.

Bagian lain dari pidato Yamin yang menarik adalah penjelasan gedung BB itu dulunya adalah kandang kuda (istal) pada zaman Daendeles menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah itu, gedung digunakan oleh sejumlah seniman Belanda dan seniman bumi-putra awal kemerdekaan untuk kegiatan kesenian. (Warta Kebudayaan, 1954: hal. 9).

Sementara itu, kalau menurut Gaos Hardjasoemantri, gedung itu sebelumnya adalah sebuah “*loods*” (yang berarti los, gudang, bangsal) yang pada waktu hujan lebat biasa terendam air sampai ke dalam (Warta Kebudayaan, 1954: hal. 6). Oleh karena itu tidak aneh bila sekarang juga sering terendam sampai ke dalam gedung ketika hujan turun.

Dengan adanya dua sumber tertulis itu status gedung BB mulai menemukan titik terang. Kedua sumber itu dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa pemilik bangunan BB adalah Kementerian PP dan K. Kesim-

pulan kedua, bahwa status BB yang didirikan oleh BMKN 14 April 1954 adalah sebagai pemakai gedung BB. Kesimpulan ketiga, pemerintah, dalam hal ini Kementerian PP dan K seperti disinggung pula oleh Yamin agar BMKN dapat bekerja, pihak pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan. Masih ditambah lagi, bantuan biaya cetak gratis penerbitan majalah INDONESIA yang diterbitkan oleh BMKN.

Mengenai adanya surat dari Dinas Pelayanan Pajak, Pemda DKI Jakarta, No. 5709/1.722, tanggal 19 Agustus 2013, tidak dapat dijadikan pegangan dalam penentuan pemilikan. Surat tagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialamatkan kepada BMKN itu semata-mata sebagai surat tagihan pajak yang harus dibayar. Bukan dalam kaitan dengan hak pemilikan melainkan BMKN dan BB sebagai yang menempati gedung tersebut. Dalam rangka pelayanan pajak, kantor Dinas Pelayanan Pajak akan mendata dan mencatat semua bangunan yang berdiri di wilayah DKI Jakarta, dan selanjutnya tagihan pajak akan disampaikan kepada siapa yang menempati dan berkewajiban membayar pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan siapa pemilik resmi gedung BB tidak ditemukan dokumen resmi dalam bentuk akte notaris tanah dan gedung BB. Keterangan dari narasumber yang mengetahui asal-usul tanah dan bangunan itu tidak dapat diharapkan karena semua sudah tiada. Ditemukannya catatan tertulis yang dimuat da-

lam Laporan Rapat BMKN dan penjelasan dalam Warta Kebudayaan, berupa laporan Gaos Hardjasoe-mantri sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN, dan sambutan Moh. Yamin sebagai Menteri PP dan K pada acara peresmian BB dapat ditempatkan sebagai satu-satunya sumber yang dapat dijadikan acuan untuk pengesahan status pemilikan tanah dan gedung BB.

Di dalam kedua sumber tertulis itu secara jelas disebutkan bahwa gedung BB dibeli oleh BMKN dengan uang yang berasal dari subsidi pemerintah (Kementerian PP dan K), dan selanjutnya pihak Kementerian PP dan K menyerahkan hak pemakaiannya kepada BMKN tanpa ada batas waktu. Dengan keterangan tersebut pihak Kementerian PP dan K, yang dalam hal ini sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik, dan pengelola gedung BB sebagai pemakai. Dengan demikian Kementerian Dikbud dapat melangkah untuk mengurus pemutihan mengenai pemilikan tanah dan restorasi gedung BB.

Kongres Kebudayaan dilangsungkan dikota Bandung, maka inilah sebagian daripada djasanja untuk memungkinkn keadaan itu dan pada hari jang akan datang pun djuga dapat saja utjaapkan, bahwa Kementerian jang saja pimpin akan memberikan bantuan sobaik-baiknja untuk melandjutkan keadaan-keadaan jang sekarang ini.

Memang bantuan jang dapat diberikan kepada gedung Balai Budeja ini pada mulanja tidaklah seberapa besar oleh karena kemampuan daripada Kementerian jang saja pimpin sampai tjukup terbatas dan pada hari jang akan datang saja djuga menjanggukan supaja bantuan ini dapat difikirkan dalam garis-garis kemungkinan jang ada pada Pemerintah.

Maka sebueni orang jang beridealisme perlulah djuga saja tegaskan bahwa dibelakang gedung jang sederhana tapiak beberapa counturen daripada kesenian dan kebudayaan kita pada hari jang akan datang.

Pertama-tama kali pada waktu ini perkembangan keseni in didalam Kotapradja Djakarta-Raya telah demikian pesatnja, sehingga kemungkinan untuk menjediakan gedung kesenian jang baru itu hendaklah djuga disusun oleh masyarakat ini djuga, kalau perlu dengan bantuan Pemerintah. Gedung kesenian sekarang ini jang ada memang mungkin sekali dan berasal lebih sederhana daripada gedung ini, jitu berupa kandang kuda daripada djaman Daendels, jang menjadi seniman dalam djaman

Petikan pidato Mr. Moh. Yamin, Menteri PP dan K, tentang dana pembelian Balai Budaya (Warta Kebudayaan tahun 1954, hal. 9)

Saudara-saudara Soemardja, Nasroen A.S. dan Henk Ngantung, Pun dari fihak Pekerdjaan Umum Kotapradja didapat bantuan dan petunjuk-petunjuk jang diperlukan.

Berkat bantuan Kementerian P.P. dan K. tersebut jang memberikan subsidi untuk membeli dan memperbaiki gedung ini, ditambah dengan subsidi dari Kementerian Penerangan jang telah digunakan untuk membiayai pemasangan penerangan, dan djuga bantuan dari Dana Bantuan Kementerian Sosial jang memungkinkan perlengkapan kursi-kursi dan meja-meja serta lemari-lemari buku, maka R.M.K.N. dapat melaksanakan usahanya mengadakan Balai Budaya ini.

Pekerdjaan dilaksanakan oleh pemborong Moh. Dien.

penerangan oleh Perusahaan listrik Liem dibawah pimpinan Sdr Ong, perlengkapan meubel oleh Woo Lie Pasarbaru dan karpet dari Perumahan Sosial Karanganyar. Panitia Pembagian aliran listrik Djakarta Raya telah menyetujui pemberian aliran kepada Balai Budaya ini.

Kepada semua fihak jang telah memberikan bantuan itu, kami mengutjapkan terima kasih banjak-banjak.

Semoga kerdja sama dan bantuan-bantuan jang menghasilkan Balai Budaya ini, merupakan bantu lontjatan untuk mengadakan usaha-usaha lain jang lebih besar lagi manfaatnja.

Petikan pidato R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja BMKN, tentang dana pembelian Balai Budaya (Warta Kebudayaan tahun 1954, hal. 7)

BAB V

LANGKAH PENYELAMATAN BALAI BUDAYA

Seperti telah dipaparkan di Bab IV, pihak Kementerian PP dan K, hanya dapat memberikan subsidi sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan, ditambah dengan bantuan biaya cetak gratis penerbitan majalah INDONESIA yang diterbitkan oleh BMKN. Dengan dukungan dana sebesar itu, BMKN maupun BB merasakan tidak cukup untuk mengatasi kekurangan biaya operasional.

Dirasakan lebih berat lagi setelah Manifes Kebudayaan dilarang, dan dana subsidi dari pemerintah diputus, sementara BMKN dan BB tidak memiliki sumber dana lagi selain dari iuran anggota yang jumlahnya sangat kecil. Demikian pula halnya dengan dana yang dihimpun dari penyewaan gedung. Berbagai upaya untuk menyelamatkan BMKN dan BB telah dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah maksimal. Makin lama BMKN bubar dan kondisi BB semakin merana.

5.1 Peminjaman gedung

Setelah gedung BB diresmikan tanggal 14 April 1954 oleh Menteri PP dan K Moh. Yamin, sebagai gedung baru dan satu-satunya pada saat itu, volume

pemakaiannya cukup tinggi. Oleh karena itu, Badan Pekerja BMKN sebagai pemegang hak pemakaian (pengelolaan) gedung, menyusun peraturan pemakaian gedung tersebut. Di dalam peraturan tersebut hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut.

Dalam Pasal 1 mengenai hal “Pokok” diatur bahwa “Pemakaian BB disesuaikan dengan sifat BMKN yang menghubungkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha organisasi dan orang seorang di lapangan kebudayaan serta untuk melaksanakan usaha-usaha seperti yang tercantum di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar BMKN”.

Di dalam pasal 2 mengenai “Izin Pemakaian” dinyatakan bahwa: “Izin pemakaian diberikan oleh Badan Pekerja BMKN dan putusan sehari-hari diambil oleh Ketua Badan Pekerja”. Selanjutnya, di pasal 3 mengenai “Permintaan Izin” diatur dengan cara permintaan izin pemakaian dimasukkan kepada Sekretariat BMKN selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum waktu pemakaian dengan mengisi formulir yang disediakan dengan membayar uang panjar sebanyak Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap-tiap kali pemakaian. Mengenai pembayaran sewa setelah izin didapat ditetapkan pembayaran untuk pemakaian pada: Pagi – jam 09.00 - 13.00 sebesar Rp. 20,-; (2) Siang – jam 15.00-18.00 sebesar Rp. 20,-; dan (3) Malam jam 20.00-23.00,- sebesar Rp. 40,-, sebagai sumbangan untuk pemeliharaan Balai Budaya.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 juga diatur mengenai “Biaya Sewaan Alat-alat” yang disediakan oleh BB. Antara lain untuk sewa pengeras suara dikenakan sewa Rp. 40,- setiap kali pakai. Pemakaian meja, apabila memakai lebih dari 4 meja dan 20 kursi, ditambah sewaan tiap-tiap 1 (satu) kursi Rp. 0.50,- dan 1 (satu) meja Rp. 1,-. Sementara itu, untuk sewa pemakaian listrik dan air ditentukan besarnya menurut pemakaian. Oleh sekretariat BMKN perhitungan akan diberikan dalam waktu 2 x 24 jam setelah selesai pemakaian.

Mengenai biaya “Kebersihan dan Kebersihan Ruangan” juga diatur pada pasal 5 sebagai berikut:

- a. Kebersihan dan kebersihan seluruh ruangan harus mendapat perhatian penuh dari pemakai dan para pengunjung, yang kesemuanya itu diwajibkan kepada penanggung jawab pemakaian tersebut untuk mengatur seperlunya.
- b. Tidak diperbolehkan memasang dan menempel ataupun memaku pada tembok ruangan gedung.
- c. Pemakai tidak boleh memberikan atau menjual makanan dan minuman kepada para pengunjung kecuali atas persetujuan pemberi izin. Minuman dan makanan hanya boleh ditaruh dan dipergunakan dalam bagian ruangan yang sengaja disediakan untuk keperluan itu.
- d. Satu jam sebelum dimulai, pintu-pintu masuk baru dibuka untuk para pengunjung dan penerangan dinyalakan.

- e. Untuk menjamin keamanan, pemakai diwajibkan meminta bantuan dari Polisi, yang harus diminta sebelum penyelenggaraan diadakan.
- f. Pemakai perlu mengadakan penjaga-penjaga pintu ruangan selama penyelenggaraan sedang dilakukan.
- g. Jamuan untuk para anggota Polisi, Pemadam Kebakaran dan pekerja-pekerja yang menjaga keselamatan, menjadi tanggung jawab pemakai.

Mengenai hal “Lain-lain” diatur dalam Pasal 6 bah-wa: *“Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam aturan tersebut di atas hendaknya dibicarakan dengan Sekretariat BMKN”*. Peraturan itu dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 April 1954, oleh Badan Pekerja BMKN. (Warta Kebudayaan: 1954).

Memasuki tahun 1965, dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI, keberadaan BMKN dan BB menjadi semakin sulit. Di dalam organisasi BMKN sendiri mulai terjadi keretakan. Selain terjadi antara kelompok di dalam BMKN, yaitu antara para penandatanganan Manifest Kebudayaan dengan yang tidak, juga disebabkan oleh indikasi adanya pengurus yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI.

Kondisi BMKN dan BB semakin surut setelah R. Gaos Hardjosoemantri wafat karena kecelakaan lalu-lintas. Trisno Soemardjo yang menggantikan posisi Gaos juga tidak dapat mengembalikan kondisi BMKN

dan BB, karena ia juga sibuk sebagai Ketua Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM).

5.2 Beberapa langkah penyelamatan

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa antara BMKN dengan BB mempunyai hubungan yang sangat dekat. Berbagai program BMKN yang dilaksanakan di gedung BB telah menempatkan gedung itu memiliki nilai sejarah yang penting bagi sejarah kebudayaan bangsa.

Ketika keberadaan BMKN setelah tahun 1965 mengalami kemunduran, dan aktivitas BB juga ikut mengalami penurunan, kondisi gedung itu semakin memprihatinkan. Ada beberapa upaya yang pernah dilakukan, tetapi hasilnya belum maksimal.

Upaya menghidupkan kembali itu datang dari berbagai kalangan. Seperti telah dipaparkan dalam Bab III, pada tahun 1967 Gubernur Ali Sadikin, memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1,3 juta untuk merenovasi gedung. Dapat dibayangkan, apabila tidak ada kepedulian Arief Budiman dan perhatian yang besar dari Gubernur Ali Sadikin terhadap kehidupan kebudayaan di wilayah kota Jakarta, gedung itu mungkin tidak dapat dilihat lagi bentuknya seperti yang ada sekarang. Begitulah nasib yang harus dialami oleh kebanyakan gedung kebudayaan.

Selanjutnya, pada acara peresmian purna pugar BB pada tanggal 15/9/1968, Arief Budiman mendesak agar BMKN menyelenggarakan rapat membahas ak-

tivitas BMKN dan perkembangan kebudayaan bangsa (Harian Angkatan Bersenjata, 27/10/1968). Apabila BMKN hidup kembali maka dengan sendirinya keberadaan BB juga akan ikut bangkit.

Tujuh tahun kemudian Pemda DKI Jakarta menurunkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. D.4-6098/d/33/1975 tahun 1975 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin tentang bangunan BB termasuk bangunan pemugaran golongan C. Dengan keputusan itu, status gedung BB telah mendapatkan perlindungan dari kemungkinan dibongkar atau digunakan untuk tujuan yang lain.

Sepuluh tahun kemudian dalam sebuah artikel di harian Kompas Alfons Taryadi menulis tentang perlunya menghidupkan kembali BMKN agar dapat mengkoordinasikan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan seperti pada penyelenggaraan Kongres Kebudayaan tahun 1954 di Surakarta, tahun 1957 di Bali dan tahun 1960 di Bandung.

Tulisan Alfons itu terinspirasi oleh perdebatan yang berlangsung ketika diselenggarakan acara "Debat tentang Seni dan Masyarakat" di TIM bulan April 1978. Ada peserta yang menyatakan bahwa: *"kini sudah waktunya diselenggarakan suatu kongres untuk merumuskan suatu kebijaksanaan kebudayaan"* (Harian Kompas, 23/5/1978).

Upaya yang lain adalah merevovasi sayap kanan gedung BB untuk dijadikan galeri. Dengan biaya Rp. 500.000,- renovasi ruang dengan luas 3 x 20 m itu da-

pat diselesaikan dan diresmikan oleh Mochtar Lubis pada 7 Januari 1986. Sebelumnya ruangan itu berfungsi sebagai tempat menginap gratis seniman termasuk Nashar, Hamsad Rangkuti, dan seniman dari daerah, tempat membaca, main catur, studio lukis dan diskusi santai dan juga sebagai gudang. Ada yang menyebutnya sebagai sanggar seni atau studio seni. Ide BB memiliki galeri itu sudah lama dirindukan itu muncul dari pelukis Zaini.

Memang, beberapa seniman merasa kehilangan tempat bermalam. Tetapi setelah direnovasi dengan dana Rp. 500.000,- disebutkan "panoramanya" berubah. Digambarkan, ruangan sempit dengan dinding dicat bersih, plafon menggunakan fiberglass, lampu neon terang benderang itu menurut *Kompas*, sebagai langkah "menghidupkan lorong seni".

Sementara itu, ketika meresmikan galeri itu Mochtar Lubis (7/1/1986) menekankan bahwa "...tekad kita sudah bulat, mulai dari yang sederhana. Yang penting, jalan dulu". Hamsad sebagai pengelola BB sangat bangga dan mengatakan "kita memang sedang bersaing dengan TIM dalam kualitas serta ikut memberi rasa angin segar pada seni rupa Indonesia".

Peresmian galeri itu ditandai dengan memamerkan karya lima orang pelukis, yaitu S. Sudjojono, Rusli, Mochtar Lubis, Mara Karma dan Dede Eri Supria. Pameran itu berlangsung mulai tanggal 7 Januari sampai dengan 7 Februari 1986. Sebagaimana fungsi sebuah galeri, lukisan yang dipajang itu adalah karya yang

diperjualbelikan. Harga lukisan S. Sudjojono dijual antara Rp. 0,5 juta hingga Rp. 2 juta. Dari hasil penjualan setiap lukisan itu BB mendapatkan 20% dari harga jual.

Tujuan dari galeri itu bukan hanya untuk komersial tetapi juga untuk memperkenalkan karya berkualitas. Selain itu juga dimaksudkan untuk menolong pelukis yang belum mendapatkan kesempatan berpameran. Bagi para pembeli juga mudah. Sebelum pelukis mendapat giliran berpameran di TIM, dapat memajang koleksinya di Galeri BB. Untuk menentukan pelukis dapat berpameran di Galeri (tanpa sewa) BMKN/BB membentuk Komite Seni Rupa. Pemilihan dilakukan secara ketat agar yang tampil adalah mereka yang punya kualitas (Sinar Harapan, 14/1/1986). Masih di tahun 1986, BB menjadi tempat pameran lukisan alam Minangkabau mulai tanggal 14-24 April 1986. Pameran itu sendiri telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 30 juta. Acara itu dihadiri Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim Sutan Mangkuto Alam telah mengubah BB malam itu menjadi "Rumah Gadang".

Acara yang dipandu oleh Taufiq Ismail itu dimei-riahkan dengan Grup Lawak, Ateng dan Sup Yusup diisi dengan acara baca sajak. Yang tampil adalah orang-orang hebat seperti Afrizal Malna, Ike Supomo, Leon Agusta, Hamsad Rangkuti, Arifin C. Noer, dan Rosihan Anwar. Dalam sambutannya Mochtar menekankan bahwa "tekad kita sudah bulat, mulai dari yang sederhana. Yang penting adalah "jalan dulu". Hamsad sebagai

pengelola BB sangat bangga dan mengatakan “kita memang sedang bersaing dengan TIM dalam kualitas serta ikut memberi rasa angin segar pada seni rupa Indonesia”. Tampak jelas, keinginan untuk mengembalikan BMKN sebagai lembaga yang berpengaruh terus mereka lakukan. (Kompas, 9/1/1986).

Upaya yang lain, pada tahun 1990-an ketika Cak Kandar mengadakan pameran lukisan, dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan. Beliau hadir dengan pakian lengkap. Ketika itu ruang gedung BB tanpa AC, sehingga Prof. Fuad harus melepas jasnya karena basah kuyup kepanasan. Cak Kandar harus mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Tetapi setelah kejadian itu, Prof. Fuad menyumbangkan dana Rp. 27 juta untuk membeli AC dan lain-lain.

Sejak itu gedung BB tampil beda, membuat para pengunjung betah berada di dalam. Tetapi sayang, enam AC itu akhirnya lenyap karena ditipu oleh orang yang menyamar sebagai “petugas” servis AC. Peristiwa itu pada hari Minggu. Dengan alasan telah mendapat perintah dari pimpinan BB, “petugas” AC palsu melakukan perawatan. Saat itu Satpam BB percaya saja. Ketika memasuki waktu makan siang, Satpam diberi uang Rp. 200 ribu oleh penipu untuk membeli nasi bungkus. Tanpa curiga, Satpam yang bekerja sendirian itu langsung berangkat. Setelah Satpam pergi penipu dengan leluasa menggondol AC dengan bebas. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Satpam setelah tiba, si penipu beserta enam AC rahib.

Langkah menuju pada penyelamatan BB yang lain datang dari Ketua RT, di mana gedung BB berdiri. Pada tanggal 22 Mei 2007 pkl. 17.00 di Kafe Pizza Jl. Gereja Theresia No. Jakarta, atas prakarsa Ibu Sumarijanto (Ketua RT) dibahas mengenai keberadaan Gedung BB. Rapat dihadiri oleh Bapak Abas Alibasjah (Pelukis/ Pengelola Balai Budaya), Drs. Luthfi Asiaro (Mantan Direktur Museum), Nunus Supardi (Sekretaris BKKI) Ahmad Djuhara (Arsitek), Ariko Andikabina (Arsitek), Agus Handoyo P, dan beberapa undangan lain yang penulis lupa namanya. Ibu Ketua RT menjelaskan bahwa rapat itu sengaja diadakan untuk mendapatkan kejelasan status dan jalan keluar mengenai keberadaan BB.

Sebagai ketua RT, Ibu Sumarijanto mengharapkan agar keberadaan gedung BB yang rusak dan diapit oleh bangunan-bangunan baru dan megah itu mendapatkan perhatian dari siapa pun. Sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah yang penting bagi kebudayaan, tidak seharusnya diterlantarkan dan tidak diurus. Perlu dilakukan pemugaraan agar keberadaannya menurut istilah Ibu Sumarijanto tidak “menodai” lingkungan wilayahnya.

Sebagai disampaikan dinyatakan di harian *Kompas* 14/8/2015, diakui oleh Abas Alibasjah bahwa gedung BB adalah milik Kementerian Dikbud. Disampaikan pula bahwa BB tidak memiliki dana untuk perbaikan gedung. Bahkan, untuk biaya operasional sehari-hari tidak ada sumber tetap yang dapat dipastikan. Se-

mentara itu, untuk pemeliharaan gedung juga tidak dapat berbuat banyak karena status pemilikan gedung itu tidak jelas siapa atau instansi yang berhak.

Bantuan renovasi yang datang dari Pemda DKI Jakarta tahun 1968 waktu Ali Sadikin masih menjabat gubernur. Bantuan itu diberikan berkat upaya yang dilakukan oleh Arief Budiman. Setelah itu sampai sekarang belum ada perbaikan lagi.

Langkah berikutnya, dilakukan oleh Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) ketika pada 14 Maret 2013 bertemu dengan Wakil Gubernur Ir. Basuki Tjahaja Purnama atau Pak Ahok. Dalam pertemuan itu, disampaikan mengenai kondisi gedung BB yang memprihatinkan. Menerima informasi tersebut, Pak Ahok menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ikut hadir untuk segera mengambil langkah penelitian dan penyelamatan. Tampaknya Pak Ahok tidak terlalu mempersoalkan mengenai status kepemilikan, tetapi harus ada langkah yang kongkrit. Diinstruksikan kepada staf, agar usaha penyelamatan gedung bersejarah itu segera dapat diselesaikan. Jangan sampai terhenti karena masalah status pemilikan tanah.

Informasi yang disampaikan oleh BKKI mendapat tanggapan Pemda DKI Jakarta dengan cepat. Tanggal 21 Agustus 2013, dengan surat No. 1084/-1.758.1, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat itu selain memberitahukan bahwa gedung

BB termasuk bangunan yang dilindungi dengan SK Gubernur No. D.IV-6098/d/33/1975 sebagai lingkungan pemugaran, juga mengharapkan BB dapat berfungsi sebagai salah satu pusat kebudayaan nasional di Jakarta.

Menindaklanjuti surat tersebut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum (PCBM) Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam bulan Oktober 2013 melakukan pengumpulan data mengenai status kepemilikannya. Dari penelusuran itu hanya ditemukan data mengenai kondisi gedung yang rusak, penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 213.121.081,-. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi dari pengelola, yaitu Abas Alibasjah sebagai Ketua "Tim 5" tidak berhasil.

Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tanggal 6 November 2013 mengadakan rapat intern dengan agenda membahas status kepemilikan bangunan BB. Rapat diikuti oleh Direktur PCBM, Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan.

Kini, perhatian Pemerintah baik dari Pemda DKI maupun pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah menunjukkan titik terang. Pada bulan Mei 2015, Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta menyelenggarakan rapat mengenai status kepemilikan gedung BB. Rapat antara lain dihadiri oleh

Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam rapat tersebut penulis menjelaskan bahwa berdasarkan tulisan dalam majalah Warta Kebudayaan dan Laporan Rapat BMKN seperti yang telah disebut di atas. Dengan penjelasan itu, maka disepakati Direktorat Jenderal Kebudayaan perlu mengadakan rapat koordinasi.

Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (Setditjenbud) menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pihak Balai Budaya, Pemda DKI Jakarta dan Direktorat PCBM. Dalam rapat itu oleh narasumber Nunus Supardi dipaparkan mengenai sejarah keberadaan gedung BB seperti dipaparkan dalam Bab III di atas. Dengan paparan itu semua pihak menganggap masalah status menjadi sedikit terang.

Kesimpulan dari rapat tersebut, pihak Ditjen Kebudayaan akan mengurus pemutihan tanah dengan berbekal tulisan yang dimuat di dalam Warta Kebudayaan 1954, dan Laporan Rapat BMKN tahun 1954. Selanjutnya, Ditjenbud akan membuat rancangan renovasi gedung BB serta melakukan kajian sejarah BB guna dipakai sebagai bahan pertimbangan penetapan sebagai bangunan cagar budaya.

Dari pihak Badan Pengelola BB membantu memberi masukan dalam hal rencana renovasi gedung dan fungsi BB sesuai yang diharapkan oleh para seniman. Harapannya, sedapat mungkin fungsi bangunan BB yang sekarang dapat dipertahankan dengan ada penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan

zaman. Sementara itu, untuk pihak Pemda DKI Jakarta diharapkan dapat membantu kelancaran dalam pemutihan status kepemilikan tanah dan izin renovasi gedung.

Dengan demikian keberadaan BB akan menjadi sejajar dengan fasilitas-fasilitas kesenian yang lain. BB dapat sejajar dengan Taman Ismail Marzuki (10/11/1968), Museum Seni Rupa dan Keramik (1990) di daerah Kota, dan Pasar Seni di Ancol (1966) yang didirikan oleh Pemda DKI. Seajar pula dengan Galeri Nasional yang didirikan oleh Kemendikbud (1998) di Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta. Juga sejajar dengan galeri-galeri baru milik pribadi seperti, Galeri Cemara, Galeri Kemang, Bentara Budaya, serta lobi-lobi hotel yang dapat digunakan untuk pameran.

Dari pihak Badan Pengelola BB dilaporkan bahwa para seniman angkatan muda yang bergabung dalam Himpunan Pelukis Jakarta (HIPTA) sangat serius untuk mengembalikan fungsi BB. Dari beberapa kali digunakan untuk pameran BB sudah mulai menggeliat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pameran diselenggarakan tanggal 25 Oktober hingga 30 November 2013 dengan tajuk JongjAkart, selain bertujuan menghidupan BB, juga mengumpulkan dana untuk biaya operasional Badan, dari hasil penjualan koleksi yang berasal dari para seniman muda.

Salah satu kegiatan yang patut dicatat adalah pameran lukisan karya Sri Warso Wahono, pada hari Minggu, 16 November 2014. Yang menarik, dalam pi-

datonya Sri Warso menjelaskan alasan mengapa pameran dilangsungkan di gedung tua, Balai Budaya, yang terletak di Jalan Gereja Theresia 47, Jakarta Pusat.

Menurut pengakuannya di saat orang-orang berebut untuk bisa pameran harus masuk di gedung-gedung mewah yang dingin, tetapi ia justru memilih berpameran di BB. Alasannya karena gedung itu merupakan tempat yang mempunyai banyak kenangan. Mengenai kenangan itu Sri Warso mengatakan: *"Pameran tunggalku yang pertama kali berlangsung di sini. Di samping sanalah, dulu si Burung Kondor (Rendra) ditangkap polisi setelah mementaskan 'Sekda'. Lalu, di situlah, pelukis maestro, Affandi, dan keluarganya tidur ketika sedang berpameran"*. (Koran Jakarta, 16/11/2014).

Sementara itu, *Kompas* memuat tulisan Agus Darmawan T, yang mengutip kata-kata Sri Warso ketika berpameran bulan Februari 2015 yang lalu. Hampir sama dengan sambutan pembukaan ketika bulan November 2014, Sri Warso mengatakan: *"Saya sengaja pameran di gedung ini agar Pemerintah DKI Jakarta dan Indonesia tahu bahwa Balbud masih ada. Walaupun gedung ini sudah sakit jantung yang akut, sekaligus asam urat, mata, darah tinggi, lever, stroke, dan sekalian sakit hati, tiada yang peduli. Semoga pameran ini memberi inspirasi: Balbud disembuhkan atau sekalian disuntik mati"* (*Kompas*, 2 Januari 2015).

Masa-masa kelam gedung dan pengelolaan BB tampaknya segera berakhir. Tanggal 5/8/2015, di BB diselenggarakan diskusi kecil, membahas langkah-langkah penyelamatan. Dalam diskusi itu penulis menampikan temuan terbitan yang memuat pidato Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin dan Ketua Badan Pekerja BMKN, R. Gaos Handjosoemantri waktu peresmian berdirinya BB. Hasil temuan itu dimuat di Harian *Kompas* 6/8/2015. Di dalam berita itu dijelaskan bahwa kini status pemilikan BB, yaitu ada pada Kemendikbud.

Berita itu disusul oleh penjelasan Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Kacung Marijan PhD, bahwa pada tahun 2016, BB akan direnovasi (*Kompas*, 7/8/2015). Dijelaskan pula bahwa kini Direktorat Jenderal Kebudayaan sedang menyiapkan permohonan tentang status pemilikan dalam bentuk sertifikat.

Dari sekilas gambaran di atas menunjukkan bahwa upaya melestarikan keberadaan BB sudah banyak dilakukan tetapi belum juga mendapatkan hasil yang final. Kunci permasalahan ada pada status kepemilikan gedung yang belum jelas, kini menjadi jelas. Dengan berlandaskan pada bunyi pidato Moh. Yamin ketika meresmikan berdirinya BB tanggal 14/4/1954 tentang asal-usul pemberian gedung BB, pihak Ditjen Kebudayaan mulai melakukan langkah kongrit untuk mengurus kejelasan status dan kegiatan renovasi gedung BB.

BAB VI

BANGUNAN BERSEJARAH

Dalam paparan di atas sudah disebutkan betapa berartinya bangunan di Jln. Gereja Theresia 47, Menteng, Jakarta Pusat itu bagi para seniman, budayawan, penulis, dan filsuf seluruh Indonesia pada era 1950-1970-an. Bangunan yang kemudian diberi nama BB itu disebut-sebut sebagai satu-satunya tempat mereka berkumpul. Bermodal bangunan yang tampak sederhana itu mereka bergulat memajukan kebudayaan dan kesenian bangsanya. BB dirintis oleh BMKN, dalam perkembangan selanjutnya BB menjadi wadah untuk menampung kegiatan BMKN.

BMKN yang berkedudukan di Ibukota Jakarta, semula berkantor di Jln. Nusantara No. 28, Jakarta. Menempati ruangan yang sempit dan sesak, membonceng pada gedung Biro Deviesen Perdagangan. Baru pada pertengahan 54 pindah ke gedung Balai Budaya di Jln. Sunda No. 47, Jakarta, kini menjadi Jln. Gereja Theresia No. 47 Jakarta.

Sebagai tempat “satu-satunya”, sejak berdirinya tanggal 14 April 1954, BB mempunyai peran yang amat penting. Seperti diharapkan oleh Yamin dalam pidato peresmian, BB menjadi “sentrum” pengembangan kebudayaan dan kesenian Indonesia. Banyak seniman (penyair, pengarang, pelukis, pematung, dramawan,

hingga aktor, aktris, penulis skrip, sutradara, pemikir kebudayaan datang berkumpul di BB setiap kali ada acara.

Delapan bulan (November 1954) setelah BB diresmikan, diselenggarakan Pameran Lukisan Se-belas Pelukis Bandung, yaitu Srihadi, Popo Iskandar, Achmad Sadali, Hetty Udit, Karnedy, But Muchtar, Sie Hauw Tjong, Soebhakto, Soedjoko, Edie Kartasoebarna, dan Kartono Yudhokusumo. Pameran ini menjadi bersejarah karena kemudian melahirkan polemik di majalah *Siasat* dalam tiga nomor terbitan bulan Desember 1954. Beberapa judul tulisan tentang polemik itu antara lain: Trisno Sumardjo, "Bandung mengabdikan laboratorium Barat", mingguan *Siasat*, No. 391, 5 Desember 1954; Sitor Situmorang, dengan judul "Modernisme", mingguan *Siasat*, No. 392, 12 Desember 1954; Sudjoko, dengan judul "Kritik Terhadap Pelukis-pelukis Bandung", Mingguan *Siasat*, No. 393, 19 Desember 1954. (Jurnal Seni Rupa & Desain Nomor: 09/September - Desember 2008, hal. 8)

Seorang kritikus dan pelukis Trisno Sumardjo (1917-1969) telah memberikan yang cukup pedas terhadap pameran itu. Dalam suatu tulisannya yang terkenal "Bandung mengabdikan laboratorium Barat", Sumardjo menulis, kesenian modern dapat dibagi dua macam yang berbeda: pertama, seni spontan dari tanah air, dilahirkan dari jiwa dan pengalaman Indonesia, sedangkan yang kedua adalah seni tiruan atau buatan di dalam gedung-gedung sekolah "laboratorium Barat"

di mana pemikiran direkatkan. Dikatakan pula bahwa mahasiswa dari lembaga itu merupakan korban dari guru-guru asing yang menyokong “modernisme”. Kesenian mereka “dangkal,” “tidak berdarah” dan bernafaskan “udara laboratorium Eropa.” Trisno Sumardjo mengharapkan agar pelukis-pelukis muda dapat membebaskan diri mereka secepat mungkin dari pengaruh Barat dalam karya mereka, dan dengan demikian mereka dapat mengembangkan “pribadi sejati” sebagai bangsa Indonesia.

Demikian pula kritikus Sitor Situmorang juga ikut menyerang dengan tidak kalah kerasnya. Dia berpendapat bahwa modernisme adalah mode yang dangkal yang diambil dari selera borjuis Barat. Lukisan Eropa yang sedang dalam krisis tidak lebih dari suatu sulapan, suatu permainan mode dengan perspektif, komposisi dan pertentangan warna. Seni modern ini tidak mengandung arti, tidak mempunyai pesan dan tidak memiliki gambaran dunia. Seni ini hanya merupakan ekspresi visual dari dunia pribadi pelukis dan tidak akan pernah dapat mengisi fungsi kebudayaan di Indonesia. (Spanjaard, Helena, 1990: hal 204).

Reaksi terhadap perkembangan seni lukis baru dari Bandung itu juga datang dari para pelukis otodidak generasi S. Sudjojono dan gaya pendidikan sanggar, dan juga dilakukan oleh para seniman yang terang-terangan bernaung dalam sebuah ideologi politik tertentu. Reaksi tersebut menjadi wajar karena gaya seni lukis di Bandung pada kurun waktu 1950-1960

memang menyimpang dari corak realisme pelukis Persagi (Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia), SIM (Seniman Indonesia Muda) atau mereka yang tergabung dalam Pelukis Rakyat. Penyimpangan tersebut terutama dilakukan para pelukis dalam lingkaran Seni Rupa-ITB.

Tetapi dari berbagai kecaman itu pada akhirnya justru telah menempatkan Seni Rupa ITB sebagai salah satu pusat perkembangan seni rupa di Indonesia. Meski di luar pendidikan ITB terdapat pelukis-pelukis Bandung lain yang berkumpul dalam komunitas seni seperti 'Jiva Mukti' dan 'Sanggar Seniman', gaya melukis Bandung dikenal kemudian sebagai gaya melukis yang mengutamakan analisa formal terhadap bentuk, garis, warna. Julukan seni abstrak Bandung memperkuat identitas pelukis Bandung .

Dari peristiwa penyerangan terhadap materi pameran para seniman Bandung pada pameran di BB tahun 1954 itulah yang pada akhirnya melahirkan sebutan "Kubu Bandung" dan kemudian dihadapkan pada "Kubu Yogyakarta". Pertentangan yang dikonstruksi itu kemudian disebut sebagai "The Great Debate" dalam buku Claire Holt yang berjudul *Art in Indonesia: Continuities and Change*. Buku itu kemudian menjadi sumber klasik tentang pertentangan Mazhab Bandung versus Mazhab Yogyakarta. Seperti diutarakan oleh Claire Holt yang dikutip oleh Asmudjo J. Irianto, dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, seorang kurator seni rupa, perkubuan atau per-mazhaban

tersebut tidak lepas dari pengaruh Polemik Kebudayaan yang terjadi sebelum masa kemerdekaan (1935), antara pihak-pihak yang mengutamakan pene-rapan kebudayaan Barat oleh Sutan Takdir Alisjahbana melawan yang mendahulukan kebudayaan asli atau Timur oleh Sanusi Pane. (Asmudjo J. Irianto, *Abstrak Indonesia* di Salihara, 20 Februari 2010).

Berkat peran BB maka kemudian dalam sejarah seni rupa Indonesia dikenal adanya “mazhab” atau “kubu” setelah melalui suatu proses bertahap untuk mendefinisikan kecenderungan gaya melukis para pelukis (dalam hal pelukis Bandung) yang mendasari karya lukis mereka dengan prinsip-prinsip formal seni. Istilah itu tampaknya lahir untuk mengatasi perbedaan gaya melukis di luar pendidikan Seni Rupa-ITB sejak pertumbuhannya menjadi jurusan seni rupa di ITB di akhir 1950-an. Setelah pameran di Balai Budaya 1954, pelukis Seni Rupa-ITB memamerkan karya-karyanya pada Pameran Nasional yang lain seperti pameran untuk menyambut Konferensi Asia-Afrika 1955. Aliran Bandung atau “Bandungers” terdiri dari komposisi mahasiswa dan dosen yang berada dalam situasi pengembangan pendidikan.

Selanjutnya, pada 1958 kelompok seniman Bandung mengulang lagi pameran di BB Jakarta dengan judul pamerannya “12 Pelukis Bandung”. Beberapa tahun kemudian, yakni 1966, masih di BB, “Sebelas Seniman Bandung” memamerkan karya-karyanya lagi, tetapi kali ini yang dipamerkan tidak hanya karya seni

lukis tetapi juga menyertakan seni patung dan *printmaking*.

Berkenaan dengan pameran 1966 itu seperti dikutip oleh Ronny Agustinus, Kenneth M. George mencatat, pameran besar “Sebelas Seniman Bandung” pada tahun itu, di Balai Budaya, Jakarta, sekali lagi menandakan keberhasilan dan pengukuhan lahirnya rezim estetik/politik baru yang didominasi oleh formalisme dan penyingkiran ide-ide progresif di segala bidang. Tak terdengar lagi kecaman-kecaman dari “kubu nasionalis kiri” yang telah dibungkam secara politik. Pameran itu “berfungsi untuk menetapkan Bandung dan para senimannya sebagai kekuatan yang sedang menanjak dalam ruang pentas pada era Orde Baru. Pengaruh, patronasi, dan kesempatan untuk menilai dan diakui mulai menjadi milik mereka—dan akan tetap menjadi milik mereka selama tiga dekade”. (Kenneth M. George, 2004: hal 37)

Mazhab Bandung memperkokoh dirinya pada 1971 dengan menyelenggarakan pameran kelompok yang dinamakan “Grup 18” di Taman Ismail Marzuki. Dengan demikian dapat dikatakan sejak BB berdiri seniman Bandung telah menorehkan peristiwa bersejarah di bidang seni rupa Indonesia.

Selain BB telah dijadikan tempat Pameran Lukisan Sebelas Pelukis Bandung yang bersejarah itu, dari kalangan seni rupa yang pernah pameran di BB antara lain adalah para maestro seni lukis seperti Affandi, Popo Iskandar, S. Sudjojono, Barli, Sudjana

Kerton, dan masih banyak lagi pernah pameran atau singgah ke BB. Pelukis Affandi sebagai seorang maestro seni lukis menyelenggarakan pameran pertama di BB pada tahun 1955 setelah pulang dari perawatannya ke Eropa. Sebagai pelukis yang sudah dikenal di dunia luar, pameran yang diselenggarakan di BB itu mendapat sambutan besar dari seniman, budayawan dan masyarakat Jakarta, Pameran tunggal kedua diselenggarakan juga di BB pada tahun 1957.

Selain Affandi, pelukis Salim yang bermukim di Paris pada tahun 1956 juga pernah melaksanakan pameran di BB. Ketika itu ia pulang pertama kali setelah Indonesia merdeka. Pameran berlangsung mulai tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober. Pada saat itu, Ajip menulis resensi tentang pamerannya dalam bahasa Sunda, dan tulisan itu tetap diingat Salim setelah beberapa tahun kemudian bertemu di Paris. (Ajip Rosidi: hal. 476). Kehadiran Salim dengan pamerannya telah menarik perhatian Baharudin, dan secara khusus menulis "Salim di Balai Budaya", dalam majalah Konfrontasi, No.13, Juli-Agustus 1956. Setelah itu disusul pameran tunggal oleh Batara Lubis dan Rusli.

Perupa lain yang pernah pameran di BB adalah pematung terkenal Gregorius Sidharta Sugio. Pada tahun 1957, ia berpameran bersama dengan pelukis Abas Alibasjah. Sepuluh tahun kemudian (1966) ia berpameran lagi bersama dengan "Sebelas Seniman Bandung". Pada tahun 1977 disusul oleh pameran

karya Mustika, menampilkan sketsa, karikatur, cat air, dan cat minyak sebanyak 60 karya. Sebagai lanjutan dari eksperimen para mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Rupa "ASRI" Yogyakarta, di BB Jakarta, pada tanggal 17-21 januari 1978 diadakan pameran presentasi, yakni pameran yang memamerkan karya-karya rekaman peristiwa dan protes sosial.

Masih banyak kegiatan pameran yang diselenggarakan di BB. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Surabaya, Makassar, Medan, Malang dll. yang sengaja tidak dibahas satu persatu. Berbagai kegiatan kebudayaan dan kesenian itu dapat dilihat di dalam tabel 2 yang menjadi lampiran dalam buku ini.

Masih ada satu lagi peristiwa kebudayaan penting yang pernah berlangsung di BB, yaitu pameran batik. Yang agak mengherankan mengapa pameran "Batik Indonesia" yang berawal dari perintah Bung Karno itu tidak pernah muncul dalam perbincangan dan tulisan. Perintah itu ditujukan kepada Go Tik Swan yang lebih dikenal dengan gelar Panembahan Go Tik Swan Hardjonagoro. Antara Bung Karno dengan Go Tik Swan memang ada hubungan yang sangat dekat.

Hubungan itu terjalin melalui pergelaran tari, ketika berlangsung acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-5 di Istana Negara tanggal 9/2/1955. Bung Karno yang hadir pada acara itu sangat terkesan dengan tarian Gambir Anom yang dibawakan oleh Go Tik Swan. Dibuktikan dengan cara Bung Karno men-

datangi Go Tik Swan di belakang panggung dan menyerahkan bunga sambil memuji tariannya. Sejak itu hubungan pribadi semakin dekat, sehingga Go Tik Swan merasakan seperti pegawai istana, dan Bung Karno telah memperlakukan dirinya seperti anak sendiri. (Rustopo, 2008: hal. 65)

Pada suatu ketika setelah selesai makamn malam, Bung Karno minta kepada Go Tik Swan yang sangat mendalami budaya Jawa termasuk batik, agar untuk bangsa Indonesia dibuatkan “Batik Indonesia”. Batik yang dimaksud oleh Bung Karno itu bukan batik Solo, Yogya, Pekalongan, Cirebon, Lasem dll, tetapi “Batik Indonesia”. Merasa sebagai “abdi” Bung Karno, Go Tik Swan berusaha keras untuk menciptakan “Batik Indonesia” seperti yang diperintahkan Bung Karno. (Rustopo, 2008: hal. 75)

Setelah melalui waktu yang lama diiringi dengan “laku spiritual” yang serius akhirnya Go Tik Swan menemukan “Batik Indonesia” yang dicarinya. Batik karya Go Tik Swan itu pada dasarnya merupakan perkawinan antara batik gaya klasik kraton (Surakarta dan Yogyakarta) dan gaya batik pesisir. Teknik sogan (pewarnaan sog) pada batik Surakarta dan Yogyakarta dikawinkan dengan teknik pewarnaan *multicolor* pada batik pesisir. Demikian pula mengenai pola-pola perubahan bentuk (*metamorphosis*) pada gaya batik Cirebon, motif tenun Bali, kadang-kadang digunakan untuk menyemarakkan perkawinan kedua gaya tersebut. Batik Indonesia karya Go Tik Swan itu selama

sepekan yaitu mulai tanggal 21–25 Desember 1955 dipamerkan di gedung Balai Budaya dan BMKN sebagai penyelenggara (Rustopo, 2008: hal. 118)

Yang membuat gedung BB lebih istimewa dan bersejarah, menurut narasumber Soedarmadji Damais (74 tahun), pameran “Batik Indonesia” itu dibuka oleh Presiden Sukarno. Pameran itu menjadi tambah istimewa karena juga memamerkan beberapa koleksi yang salah satunya berjudul “Konsepsi Presiden Sukarno”. (Rustopo, 2008: hal. 118)

Selain sebagai tempat pameran, BB juga menjadi “rumah seniman” dalam arti seniman tidur dan tinggal di BB. Setiap kali pameran Affandi dengan keluarganya tidur di BB dengan cara memasang sekat. Ada pula seniman yang pernah tidur di BB tidak hanya semalam dua malam melainkan sampai berbulan-bulan. Pelukis Nashar yang mempunyai melukis di waktu malam, sudah biasa menggeletak di BB, beralaskan tikar. Sumber lain menulis, Nashar sebagai orang awak kelahiran Pariaman (Sumbar) itu bertahan tinggal mengelana di Balai Budaya, tidur diatas meja dengan sejumlah lukisan–lukisan yang ditumpuk begitu saja berdesakan. (Sumber: <http://blogsenerupa.Blog-spot.com/2010/11/profil-pelukis-nashar.html>).

Ketika di tahun 1954 pelukis Sudarmadji pindah ke Jakarta, ia juga tinggal bersama Nashar di BB. Demikian pula ketika Trubus baru pulang dari Cekoslovakia, Nasjah Djamin dari Yogyakarta, Popo Iskandar dari Bandung, dan seniman-seniman dari luar kota seperti

dari Medan mereka menurut Ajip Rosidi “ngadon menginap” di BB (Ajip Rosidi, 2008: hal. 159)

Demikian pula halnya dengan pelukis Hardi, ketika memasuki kota Jakarta dari daerah asalnya, Blitar. Sembilan bulan ia tinggal di Balai Budaya. Mungkin karena BB sudah anggap “rumahnya”, setelah acara akhad nikah pun, Hardi berangkat pagi-pagi dari BB. Ia diantar dengan kendaraan mobil sedan Pak Suparmo (77 tahun), kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah DKI Jakarta saat itu. Hardi diantar dengan mobil Corola butut warna biru.

Selain diantar Pak Suparmo, ia juga ditemani oleh teman-teman dekat, antara lain Arwah Setiawan, Eka Budianta, Bambang Bujono dan Pak Suparmo untuk membantu mengatur segala keperluan administrasi karena keluarga dari pihak mempelai perempuan dan dari pihak Hardi tidak ada satupun yang datang. Usai dari Catatan Sipil, Hardi kembali ke BB untuk makan soto bersama-sama dengan teman-temannya dari uang utangan. Bagi pelukis yang pada tahun 1980 ditahan karena karyanya “Presiden 2001”, BB telah memberi kesan mendalam. (Sumber: http://pelukishardi.com/about-hardi.html#.Vd_MNY_txmUk)

Dari kalangan sastrawan seperti Trisno Sumardjo, Anas Ma’ruf, Intojo, Armijn Pane, J.E. Tatengkeng, Achdiat Kartamihardja, Hamsad Rangkuti, Mochtar Lubis, Pramudya Ananta Toer, WS Rendra, Sapardi Djoko Damono dll. pernah tampil di BB. Kegiatan sastra yang berlangsung antara lain adalah, baca sajak (deklamasi)

baca cerita pendek (Cerpen), monolog, pementasan drama, dll. Bengkel Teater milik dramawan WS Rendra mementaskan drama "BIP-BOP" pertama kali di BB sebelum dipentaskan di TIM. Pementasan Bip-Bop atau lebih dikenal dengan nama Teater Mini Kata di gedung BB dibantu oleh Chaerul Umam yang kemudian dikenal sebagai sutradara Film.

Dari balik drama Bip-Bop itu ada kisah menarik dialami oleh Chaerul Umam. Keterlibatannya dalam drama Rendra itu meninggalkan kesan paling mendalam, karena ia harus „memberanikan diri mencuri perhiasan ibunya untuk pergi ke Jakarta“ dalam rangka menyukseskan pentas Bip-Bop di BB itu. Perhiasan itu digadaikan agar bisa naik kereta api dari Yogyakarta ke Jakarta, bulan April tahun 1968. (Achmad Syaeful Anwar, 2012: hal. 23-24). Di BB pula WS Rendra ditangkap setelah mementaskan karya dramanya yang berjudul "Sekda".

Acara lain yang pernah berlangsung di BB adalah Simposium Bahasa Sunda pada bulan April 1955. Yang hadir kebanyakan para pengarang muda yang menulis dalam bahasa Sunda, yang dimuat di majalah Sunda. Yang hadir antara lain Sahuri, Priatna Affiatin, Kusnadi Prawirasumantri, Wahyu Wbisana, Ajip Rosidi, Utuy Tatang Sontani, Boejoeng Saleh Poeradisastra, Rusman Sutiasumarga, E. Permana dll. Mereka datang dari Bandung, Sukabumi, Bogor dan Jakarta. (Ajip Rosidi, 2008: hal. 117)

Seperti pernah dikisahkan oleh Misbach Yusa Biran, yang banyak mengetahui keberadaan gedung itu, sejumlah seniman kerap berdiskusi di BB. Sejumlah seniman dan penyair ternama yang disebut antara lain HB Jassin, Wiratmo Sukito, Asrul Sani, Ajip Rosidi, Umar Khayam, Wahyu Sihombing, Misbach Yusa Biran, Daduk Jayakusumah, Gayus Siagian, Taufiq Ismail, Soe Hok Djien, Kusnadi, HB Jassin, Zaini, Soedjatmoko, Goenawan Mohamad, Sutardji Calzoum Bachri, Nugroho Notosusanto, dll. juga sering tampil dan berdiskusi di gedung BB. Seperti dikutip oleh Alwi Shahab, menurut Misbach gedung BB itu *"pernah menjadi barometer kesenian di Jakarta, khususnya di tahun 1960-an dan 1970-an"*.

Selain itu, BB juga menyimpan banyak peristiwa budaya bersejarah lainnya. Manifesto Kebudayaan dicetuskan pada 17 Agustus 1963 dibahas dan disipkan naskahnya di BB pula. Yang hadir antara lain: Wiratmo Sukito, Trisno Sumardjo, HB Jassin, Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohamad, dan lain-lain. Setelah naskah itu selesai oleh Arief Budiman diedarkan untuk mendapatkan dukungan dari seniman, budayawan dan cendekiawan, dengan cara membubuhkan tanda tangan.

Tanggal 8 Mei 1964, Manifes Kebudayaan dilarang oleh Bung Karno. Semua penanda tangan Manifes berkumpul dan berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebagai akibat dari pelarangan itu para penanda tangan dan pendukung dikucilkan,

dilarang melakukan kegiatan, hingga diberhentikan dari pekerjaan dan jabatannya.

Pada tanggal 27 Mei 1968, di BB diselenggarakan rapat pertama Badan Pembina Kebudayaan, membahas program kerja dan bentuk organisasi. Badan ini kemudian berubah nama menjadi Dewan Kesenian Jakarta (DKD) yang kemudian disesuaikan dengan EYD berubah menjadi DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) sampai sekarang (Ajip Rosidi, 2010: hal. 414).

Masih ada peristiwa budaya yang lain yang terjadi di gedung BB. Di BB pada tanggal 30 November 1973 juga pernah diselenggarakan diskusi, membahas tema “Untung Rugi Modal Asing di Indonesia”. Diskusi dimoderatori oleh penulis terkenal, Mochtar Lubis. Para pemakalah adalah Dorodjatun Kuntjorojakti, Maruli Panggabean dan Suhadi. Diskusi antara lain dihadiri oleh eks anggota Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) seperti Adnan Buyung Nasution, Yap Thian Hien, dll.

Diskusi itu menghasilkan ikrar yang diberi judul “Ikrar Warga Negara Indonesia”. Ikrar itu dibacakan oleh salah seorang peserta dari Fakultas Sastra UI bernama Sylvia Gunawan. Bunyi ikrar “Ikrar Warganegara Indonesia” yang isinya tidak banyak diketahui orang itu adalah sebagai berikut:

“Kami warganegara Indonesia yang berkumpul pada tanggal 30 November malam bertempat di Balai Budaya, menyadari akan arah perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa pada dewasa ini, berikrar:

- Menegakkan kembali kebanggaan nasional yang sebagian telah dicemarkan oleh berbagai kalangan masyarakat
- Menggunakan dengan segala cara yang berdasarkan konstitusi untuk menegakkan kembali kebanggaan nasional tersebut
- Menetapkan hari ini, tanggal 30 November 1973 sebagai titik tolak usaha ini". (Wiwoho & Chaeruddin, 1990: hal. 228).

Setelah ikrar tersebut dibacakan, kemudian di-darkan untuk mendapatkan tandatangan dari orang-orang yang menyetujuinya. Ternyata berhasil mengumpulkan 155 penandatanganan antara lain Mochtar Lubis, Yap Thiam Hien, Adnan Buyung Nasution, Taufik Abdullah, Yuwono Sudarsono, Dorodjatun Kuntjoro-jakti, Marsilam Simandjuntak, Remy Leimena, Hariman Siregar, Yozar Anwar, Louis Wangge, dan lain-lain. (Kompasiana, 16 Januari 2012).

Peristiwa penting yang lain adalah ketika pecah peristiwa "Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974". Saat itu BB juga menjadi tempat singgah dan berlabuh para tokoh muda, seniman, aktivis, wartawan, dan cendekiawan. Berkumpul di BB tokoh-tokoh muda seperti Hariman Siregar, Jesse A Monintja, Fikri Jupri, Gurmilang Kartasasmita, Salim Hutadjudu, Eko Djatmiko, Todung Mulya Lubis, Aini Chalid, dll. (B. Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa Tahun: hal. 228). Selain itu juga ditulis bahwa Jesse bergegas menuju Balai Budaya, tempat ia biasa berkumpul dengan aktivis lain, dan bertemu Fikri Jufri (wartawan

Tempo). Keduanya lalu berboncengan skuter melihat situasi. (Husen Daulay, Amir dan Imran Hasibuan/Ed., 2011: hal. 57). Konon, rapat-rapat penyusunan “Petisi 50” selain diselenggarakan di rumah Ali Sadikin dan tempat lainnya, juga pernah berlangsung di BB.

Masih soal aktivitas di BB, seperti yang telah disinggung di depan, atas ide Mochtar Lubis pada tahun 1986, sayap kanan gedung BB dirombak menjadi galeri. Ruangannya seluas 3 x 20m itu disulap mejadi “galeri” atau “pavilion seni”, yang digunakan oleh para pelukis untuk memajang karyanya. Selain itu, di gedung BB Slamet Rahardjo main drama berjudul “Hantu” (Ghost), dan pada pagi harinya koran menulis “semalam di Balai Budaya telah lahir aktor baru”.

Dari gambaran sekilas itu menunjukkan bahwa dengan adanya gedung BB itulah BMKN dapat melakukan berbagai kegiatan kebudayaan. Sejak berdiri tanggal 14 April 1954, BB mempunyai peran yang amat penting dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia. Seperti diharapkan oleh Yamin dalam pidato peresmian, BB dapat menjadi sebuah “sentrum” pengembangan kebudayaan dan kesenian Indonesia.

Harapan itu telah terwujud. Banyak penyair, pengarang, pelukis, pematung, dramawan, komikus, hingga aktor, aktris, penulis skrip, sutradara, pemikir kebudayaan datang berkumpul di BB baik ada maupun tidak ada acara. BB menjadi rumah (balai) tempat bernaung menjalankan aktivitas kebudayaan yang sa-

ngat dibanggakan oleh para seniman, budayawan dan cendekiawan saat itu.

Selain sebagai tempat pameran, pergelaran, seminar dan diskusi, BB juga menjadi tempat latihan tari, musik, melukis, menulis dll. Sebagai pelatih melukis antara lain oleh Oesman Effendi, Zaini, Nashar, Mustika dan Mardian. Peserta latihan itu antara lain Arief Budiman, yang untuk pertama kali bertemu dengan pelukis Nashar di Balai Budaya tahun 1956. Waktu itu Arief Budiman masih berstatus pelajar SMP kelas II Kanisius Jakarta (Arief Budiman, 2006: hal. 394).

Peserta yang lain adalah Djamaludin Joeda dan isteri, Konsul Jenderal RI di Kobe, Jepang. (Ajip Rosidi, 2008: hal. 806). Orang terkenal yang juga pernah belajar melukis di BB adalah Ed Zoelverdi. Ia dikenal sebagai pewarta foto profesional di Indonesia. Tidak salah bila ia lebih dikenal dengan sebutan “Mat Kodak”. Buku karyanya “Mat Kodak, Melihat Untuk Sejuta Mata” (Grafitipers, 1985) menjadi salah satu buku wajib bagi semua insan yang tertarik untuk berkiprah di dunia foto jurnalistik Indonesia hingga kini. (Sumber: <http://www.seribukata.com/2012/01/mat-kodak-entepengen-jadi-wartawan-foto-kuncinya-curiosity-rasapengen-tahu/>)

Ia memulai kariernya dalam dunia jurnalistik dengan bergabung dengan harian KAMI pada era 1960-an. Sebelum menjadi fotografer terkenal dengan belajar fotografi secara otodidak, besarnya hasrat pada komunikasi visual itu dimulai dengan belajar desain

grafis dan melukis pada Nashar dan Oesman Effendi di BB Jakarta. Ternyata pula, sebelum menjadi pelatih melukis, dan pelukis terkenal sebelumnya Mustika belajar dan berlatih melukis di BB.

Di antara sekian banyak peristiwa budaya yang berlangsung di BB, yang dianggap paling heboh adalah polemik kebudayaan antara Lekra yang berhaluan komunis (kiri), dengan kelompok Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) didukung oleh kelompok netral (kanan). Pokok persoalan yang dipolemikkan adalah mengenai humanisme-sosial dengan humanisme universal dalam berkesenian. Bagi kelompok kiri (humanisme-sosial), seniman dan sastrawan yang berhimpun di dalam Lekra harus berani, mahir berpikir, dan mengasah kesenimannya. Slogan yang digunakan adalah “seni untuk rakyat” dan “politik adalah panglima”. Tujuannya, agar kebudayaannya meninggi, mutu artistik dan ideologi karyawannya menjulang, tahan kritik, tahan waktu dan berfungsi dari masa ke zaman (Tempo, 2014: hal. 5)

Sementara itu kelompok kanan (humanisme universal) setelah mendapat serangan dari kelompok kiri menganggap sudah tiba saatnya untuk mengeluarkan pernyataan. Pernyataan itu menjadi pernyataan budaya yang gaungnya meluas ke mana-mana, yang dikenal dengan nama Manifes Kebudayaan. Tujuannya, adalah suatu ikhtiar untuk memperoleh ruang yang lebih longgar bagi ekspresi kesenian yang mandiri – yang

independen dari desakan politik dan pelbagai cara revolusioner tahun 1960-an. (Tempo, 2014: hal. 101)

Polemik itu pada awalnya masih fokus pada masalah kebudayaan dan kesenian. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya polemik itu melebar, berbaur dengan urusan politik. Secara terbuka kelompok kiri melontarkan tuduhan kontra revolusi, anti-Manipol, anti-Usdek, anti-Nasakom, anti-Nekolim dan bahkan sampai pada anti-Sukarno. Polemik juga dibumbui dengan aroma fitnah, benci, caci maki dan kata-kata yang tidak elok. Kata-kata “ritul”, “pecat”, “ganyang”, “tumpas”, “plinthat-plinthut”, dll sering digunakan. Sampai-sampai sejarawan Aswi Marwan Adam (2009) menyebutnya sebagai “kejahatan berbasis kebencian”.

Sikap lapang dada ditunjukkan oleh kelompok kanan melalui Manifes Kebudayaan itu, hasilnya justru sebuah antiklimaks. Setelah dengan berbagai tuduhan dapat meyakinkan Presiden Sukarno, pada tanggal 8 Mei 1964 Manifes Kebudayaan dilarang. Alasannya, Manipol tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain. Apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya.

Walaupun usia Manifes Kebudayaan memang pendek - hanya 8 bulan 23 hari saja - tetapi banyak orang mengakui gaungnya mampu menembus waktu yang panjang. Sebaliknya, BB yang menjadi rahim kelahiran Manifes Kebudayaan dilupakan orang. Sanksi sosial dan administrasi yang dijatuhkan kepada para

penanda tangan dan pendukung Manifes membuat mereka trauma. Mereka dikucilkan, diberhentikan dari PNS, dilarang mengajar, pentas, pameran, dan aktivitas lainnya. Beberapa dari mereka meninggalkan BB. Menjadi tambah sepi dan merana setelah Lekra akhirnya juga dilarang dan dibubarkan.

Dari gambaran singkat itu, BB benar-benar telah menjadi sentrum kegiatan budaya seperti yang diharapkan oleh Moh. Yamin. Tidak hanya sebagai "sentrum", tetapi juga disebut orang sebagai "rumah budaya", "rumah singgah", "tempat berlabuh", "oase", "barometer", "dapur ide" dan juga sebagai "candradi-muka" bagi para seniman dan budayawan.

Dalam hal ini BB telah memainkan peran sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tentang keindonesiaan di bidang budaya. Juga telah menjadi pusat penyaluran daya kreativitas dan pemikiran para anggota BMKN sebagai pendiri BB. Dalam hal ini BB dapat disebut telah menjadi semacam laboratorium dan etalase pengembangan kebudayaan Indonesia. Diakui oleh Agus Darmawan, ide-ide besar kebudayaan pernah lahir di BB. Menurut Kompas.com, sampai dengan tahun 1997 tidak kurang dari 600 acara pernah digelar di gedung BB (Kompas.com, 14/8/2015). Kalau dihitung sampai sekarang jumlah itu pasti akan bertambah banyak. Upaya mengumpulkan berbagai kegiatan itu mengalami kendala karena data berbagai kegiatan itu belum ditemukan. Dari hasil pengumpulan berbagai

sumber hasilnya dapat dilihat dalam tabel 2 di lampiran.

Dari paparan mengenai berbagai peran dan sebutan yang disandang oleh BB, maka dapat disimpulkan situs dan gedung BB memiliki nilai sejarah yang penting bagi kemajuan budaya bangsa. Gedung sempit dan sederhana itu tidak hanya semata-mata menjadi arena berlangsung berbagai kegiatan kebudayaan dan kesenian tetapi juga arena pergulatan ide, gagasan dan pikiran-pikiran tentang keindonesia kebudayaan kita. Para seniman, budayawan dan cendekiawan telah melangsungkan polemik panjang, dan terlama dalam sejarah kebudayaan Indonesia.

Surat HB Jassin kepada sahabatnya di Belanda, Dolf Verspoor beberapa sebulan sebelum BMKN berdiri merupakan sinyal dimulainya polemik panjang itu. Jassin menceritakan tentang Lekra yang dalam waktu singkat membuka cabang di berbagai kota, kedutaan RRT membagi-bagikan buku kebudayaan, kesenian, dan kesusasteraan kepada badan-badan, kantor-kantor dan orang perorangan. Jassin merasakan sebagai berbahaya sekali "*gezichtsverenging*" (penyempitan pandangan) yang dibawa oleh visi kesenian "progresif" itu. (DS. Muljanto dan Taufiq Ismail, 1995: 273). Polemik itu dapat dikatakan berhenti setelah Lekra dilarang dan dibubarkan.

Dalam kedudukannya seperti digambarkan di atas, sangat dapat dipahami apabila banyak orang yang menyangkan keberadaan gedung BB dibiarkan sepi,

merana dan dalam kondisi memprihatinkan. Status kepemilikan yang tidak jelas menjadi alasan utama mengapa hal itu bisa terjadi. Sementara itu, gedung-gedung kebudayaan yang baru dan megah kini bermunculan. Suatu penyikapan yang tidak sebanding dengan nilai sejarah yang telah digoreskannya.

Situs dan gedung BB perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Sesuai amanat UU No. 10/2011 tentang Cagar Budaya, situs dan gedung BB patut diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam Pasal 5 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa kriteria bangunan yang dapat disebut sebagai cagar budaya antara lain berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Kalau bangunan BB oleh Moh. Yamin disebut sebagai bekas kandang kuda zaman Daendeles yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1816, berarti usia bangunan itu telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain itu, pada huruf c disebutkan bahwa bangunan itu memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan atau kebudayaan. Dilihat dari sisi ini tidak dapat dibantah lagi, situs dan bangunan BB memiliki arti khusus itu. Apalagi kalau keberadaan dikaitkan dengan masalah pembangunan karakter bangsa, tidak ada orang yang membantah betapa besar sumbangan BMKN dan BB bagi pembangunan manusia yang berbudaya Indonesia.

BAB VII

PENGELOLAAN BALAI BUDAYA

Sebagaimana disinggung dalam Bab-bab sebelumnya, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh KK 1951 di Bandung, pada tanggal 12-14 April 1952 di Jakarta diselenggarakan Konferensi Kebudayaan Indonesia. Pada hari terakhir, tanggal 14 April 1952, para peserta Konferensi dengan suara bulat menyetujui dibentuknya lembaga yang diberi nama *Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)*.

Dua tahun kemudian, pada ulang tahun ke-2 BMKN, yaitu tanggal 14 April 1954 diremikan oleh Menteri PP dan K Moh. Yamin berdirinya BB sebagai wadah untuk menampung aktivitas BMKN. Pengelolaan BB menjadi satu dengan pengelolaan BMKN, yang diurus oleh Ketua Badan Pekerja BMKN, R. Gaos Hardjasoemantri.

Dalam perjalanan sejarah BMKN maupun BB sampai sekarang telah mengalami masa-masa kejayaan dan kemudian mengalami masa-masa surut. Masa kejayaan itu dialami mulai dari berdiri tahun 1952 sampai dengan 1965. Kejayaan itu ditunjukkan dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang keindonesiaan kebudayaan dan berbagai karya, seperti yang dipaparkan dalam Bab VI.

Sementara itu, BMKN dan BB mengalami masa surut mulai tahun 1965 sampai sekarang. Setelah Gaos Hardjasoemantri wafat pada tahun 1965, jabatan Ketua Badan Pekerja BMKN dilanjutkan oleh Trisno Soemardjo. Pada masa jabatan Trisno Soemardjo keadaan BMKN mulai melemah. Hal yang sama sebenarnya juga dialami oleh lembaga-lembaga kebudayaan lain, tetapi dengan alasan yang berbeda. Untuk Lekra alasannya sudah jelas. Bukan melemah melainkan malahan dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah.

Sementara itu, LKN melemah karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PNI sebagai induk organisasi LKN. PNI pecah menjadi dua, PNI Ali Sastroamidjojo dan PNI pimpinan Osa Maliki. Adapun untuk organisasi kebudayaan yang lain seperti Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi), Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (Laksmi) Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK) dll, juga ikut terbawa arus, cenderung semua aktivitasnya menurun. Berbagai upaya untuk menghidupkan kembali keberadaannya tidak berhasil.

Melemahnya aktivitas BMKN memberi pengaruh besar terhadap keberadaan BB, karena keberadaan BB di bawah koordinasi BMKN, Aktivitas kebudayaan/kesenian ikut mengalami kemunduran, setelah pengurus satu-persatu meninggalkan BMKN. Ada beberapa penyebab, yang membuat lembaga BMKN yang tadinya

merupakan lembaga yang paling berpengaruh setelah Lekra dan LKN, menjadi mandul.

Pertama, BMKN seperti kehabisan stamina setelah mendapat berbagai tekanan dari pihak Lekra dkk., dituduh anti Manipol-Usdek, kemudian pada puncaknya pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden Sukarno. Tidak hanya pelarangan, tetapi juga diikuti dengan pengucilan, pemecatan para penanda tangan Manifes Kebudayaan dari tugas dan jabatannya.

Kedua, diberhentikannya dana bantuan untuk operasional BMKN dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagai buntut dari pelarangan Manifes Kebudayaan. Dengan tidak adanya subsidi membuat organisasi BMKN dan BB tidak banyak melakukan aktivitas.

Ketiga, dengan adanya pelarangan dan pembubarhan PKI/Lekra, diindikasikan sebagian dari anggota pengurus dan aktivis BMKN dan BB terlibat dalam peristiwa itu. Suasana kerja pengurus menjadi tidak kompak, dan menumbuhkan rasa saling curiga, karena tidak jelas siapa kawan dan siapa lawan.

Keempat, suasana saling curiga itu juga menimbulkan keretakan hubungan di antara para pengurus dan dengan anggota BMKN sendiri. Dikisahkan oleh Ajip Rosidi, Anas Ma'ruf karena tidak ikut menandatangani Manifes Kebudayaan, banyak menceritakan sakit hatinya oleh tingkah para seniman dan sastrawan muda yang menuduh dan menganggapnya sebagai orang yang tidak ikut melawan Lekra dan karena itu

tidak berhak atas kemenangan itu. Padahal, diakui oleh Ajip, Anas adalah administrator yang aktif dan cakap dalam memutar roda BMKN. (Ajip Rosidi, hal 192-193)

Kelima, secara tidak langsung kehadiran Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai Pusat Kesenian Jakarta di Jln. Cikini Raya yang diresmikan tanggal 10 November 1968, telah menggeser perhatian orang terhadap keberadaan BB. Lokasi pembangunan TIM sendiri tidak jauh dari BB. Ditambah lagi, posisi Trisno Soemardjo sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN sementara, merangkap sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Dengan demikian perhatian lebih banyak dicurahkan pada kegiatan DKJ/TIM sebagai sebuah lembaga baru.

Sebenarnya kalau menurut pidato Ali Sadikin pada acara serah-terima Museum Kota Jakarta dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada pemerintah DKI Jakarta tahun 1968, di lokasi itu direncanakan juga akan dibangun sebuah gedung Museum Kota Lama yang baru. Bangunan di satukan dalam satu kompleks dengan Pusat Kesenian TIM yang saat itu sedang dibangun. (Sinar Harapan, 25/6/ 1968). Sampai saat ini rencana pembangunan gedung itu tidak terdengar lagi. Kemungkinan besar juga akan tetap menempati gedung *Staadhuis* di daerah kota tua.

Masih dalam kaitan dengan pengelolaan BMKN/BB, dalam rentang waktu 53 sejak BMKN dan dan 51 tahun sejak diresmikannya BB telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan pengelola. Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika penge-

lolaan itu, sejak diresmikan hingga sekarang dapat dikelompokkan dalam periode sebagai berikut.

Pertama, periode 1954-1965. Sebagaimana yang tercantum dalam pemberian mandat kepada Panitia Kesimpulan oleh Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, disepakati untuk mendirikan lembaga baru dengan nama *Badan Musjawarat Kebudayaan Nasional*, disingkat *BMKN*. Selanjutnya, untuk melengkapi susunan pengurus, Anggaran Dasar (AD), penetapan organisasi berbadan hukum, dll, dibahas dalam Konferensi Kebudayaan Indonesia. Konferensi diselenggarakan pada tanggal 14 April 1952 di Jakarta, menyepakati susunan pengurus dan Anggaran Dasar (AD) *BMKN*. Lembaga ini berkantor di Jln. Nusantara No. 28 Jakarta.

Selain itu juga disepakati dibentuknya Badan Pekerja *BMKN*. Tugasnya adalah menjalankan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Badan Pekerja menyusun dan melaksanakan berbagai program di bidang kebudayaan. Untuk menunjang kegiatannya, pada tanggal 14 April 1954, *BMKN* mendirikan Balai Budaya di Jln. Sunda No. 47, Jakarta, yang sekarang menjadi Jln. Theresia No. 47, Jakarta.

Jabatan Ketua Badan Pekerja *BMKN* dipercayakan kepada R. Gaos Hardjasoemantri sejak diresmikannya *BMKN*. Dalam KK 1954 di Surakarta, KK 1957 di Bali dan KK 1960 di Bandung, nama R. Gaos Hardjasoemantri selalu diterima dengan aklamasi disepakati tetap

menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN. Jabatan sebagai ketua berakhir setelah ia mengalami kecelakaan lalu-lintas 1965.

Kedua, adalah periode 1965-1969. Sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja BMKN, Trisno Sumardjo menggantikan almarhum Gaos Hardjasoemantri. Pada saat Gaos memimpin, Trisno Sumardjo dan Anas Ma'ruf merupakan motor penggerak organisasi BMKN.



menjelang dan menghadapi kemelut peristiwa G30S/PKI, di kalangan para seniman dan budayawan dengan payung Gaos Hardjasoemantri.

R. Gaos Hardjasoemantri (Sumber: koleksi foto Erry Riyana Hardjapamekas)

Ketika terjadi masa sulit ketika para seniman penandatangan Manifes Kebudayaan dianggap sebagai binatang buruan, bersama Anas tetap menolong kawan-kawannya. Salah satu contoh anggota BMKN yang ditolong adalah penyair WS Rendra. Sebagai penanda tangan Manifes Kebudayaan semua tulisan Rendra ditolak oleh berbagai media. Oleh Trisno dan Anas dibantu Sudjatmoko mendapatkan beasiswa belajar ke Amerika Serikat.

Selain sebagai pemegang tongkat estafet memimpin BMKN dan BB, Trisno juga banyak disibukkan oleh pekerjaan di Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM). Trisno adalah salah satu tokoh perintis berdirinya lembaga baru itu. Memimpin BMKN/BB baru selama empat tahunan, pada tanggal 21 April 1969, Trisno wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat serangan



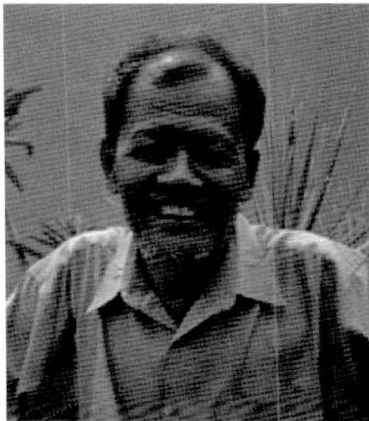
jantung. Jenazahnya dikuburkan di TPU Karet, Jakarta, berdekatan dengan makam Chairil Anwar. Seninggal Trisno Sumardjo, BMKN dan BB seperti anak ayam kehilangan induknya.

Trisno Sumardjo (Sumber:Wikipedia)

Ketiga, periode 1969-1978. Periode ini diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induk karena tidak jelas lagi siapa yang memimpin lembaga BMKN dan BB. Sejak Trisno Sumardjo wafat hingga tahun 1978, saat Hamsad Rangkuti memimpin pengelolaan BB mulai tahun 1978, ada masa “vakum pengurus”. Selama hampir sepuluh tahun itu tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap BB. Dapat dipahami apabila BB menjadi merana dan memprihatinkan seperti ditulis oleh Alwi Sahab.

Keberadaan majalah Horison dan Hamsad Rangkuti di sayap kiri BB secara tidak langsung dalam keseharian “terlibat” di dalam pengelolaan BB. Dapat dimengerti apabila Hamsad yang bekerja di majalah sastra Horison dan pada tahun 1986-2001 menjabat sebagai Redaktur majalah sastra Horison didaulat menjadi pengelola gedung BB.

Keempat, periode 1978-1998. Setelah hampir sepuluh tahun kepengurusan BB vakum, mulai tahun 1978 Hamsad Rangkuti tercatat sebagai pimpinan pengelolaan BB. Dengan demikian aktivitas BB sedikit demi sedikit mulai pulih meskipun tidak seperti masa-masa sebelum Manifes Kebudayaan dilarang. Berbagai



pameran diselenggarakan oleh para seniman yang datang dari berbagai wilayah.

Hamsad Rangkuti (Wikipedia)

Tampaknya, di bawah kepemimpinan Hamsad Rangkuti terjadi gejolak di antara para seniman dan budayawan saat itu. Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan itu, atas inisiatif beberapa warga BB yang tergabung dalam “Keluarga Besar BB”, melakukan pertemuan. Yang bergabung dalam keluarga besar itu antara lain Wiratmo Sukito, Ilen Surianegara, Ramadhan KH, Remmy Silado, Cak

Kandar, Rajab Ranggasuli, Bambang Heriyanto, Sides Sudiarto, Marah Djibal, dll. Mereka yang tergabung dalam keluarga besar itu adalah anggota BMKN, dan dengan demikian kehadirannya mewakili induk organisasi dari BB.

Tahun 1998 menurut istilah Agus Darmawan T, pengelolaan BB di bawah sastrawan Hamsad Rangkuti sedang mengalami masalah. Kepemimpinannya “diguncang” oleh sejumlah seniman, dan segenap “menterinya” akhirnya mundur. BB yang tadinya padat kegiatan justru malah sepi acara. (*Kompas*, 2/1/ 2015).

Kelima, periode 1998-2014. Setelah terjadi pe lengseran Hamsad Rangkuti, Warga Besar BB sepakat membentuk “Tim 5”. Disebut demikian karena anggotanya terdiri atas lima orang tokoh, yaitu Abas Alibasjah sebagai ketua, Bambang Heriyanto, Sides Sudiarto, Marah Djibal dan Cak Kandar. Tugas utama dari “Tim 5” adalah menghidupkan fungsi gedung BB sebagai tempat aktivitas kebudayaan dan kesenian seperti ketika BMKN mengalami masa jayanya.

Selama di bawah pengurusan “Tim 5”, ternyata aktivitas BB justru semakin memudar. Menghadapi kenyataan seperti itu, setelah dilakukan evaluasi disimpulkan bahwa “Tim 5” harus diperkuat dengan cara ditambah jumlah anggotanya. Disepakati, “Tim 5” ditambah jumlahnya menjadi “Tim 15”. Kesepuluh orang yang memperkuat “Tim 5” itu adalah Remmy Silado, Leon Agusta, Tomy Awuy, Edi Sedyawati, Dewi

Fortuna Anwar, Darto Singo, Sides Sudiarto, Labes Widar, Sitok Srengenge dan Ny. Sutrisno.

Meskipun telah diperkuat menjadi “Tim 15” keadaan gedung BB masih saja tidak berdaya. Orang lebih memilih beraktivitas di lembaga-lembaga baru dan relatif lebih lengkap fasilitasnya seperti Pasar Seni Impian Jaya Ancol, TIM, TMII, Museum Seni Rupa dan



Keramik, Galeri Nasional dan di galeri-galeri milik pribadi, lobi hotel yang banyak bermunculan.

Abas Alibasjah (Wikipedia)

Keberadaan gedung BB yang bersejarah itu telah dilupakan banyak orang. Sehari-hari gedung yang sangat strategis tempatnya itu selama berbelas tahun hanya memajang koleksi yang sama. Seperti sebuah museum tetapi juga seperti gudang karena tidak ada pengunjung yang datang. Di antara lukisan yang dipajang itu kebanyakan lukisan Abas Alibasjah. Selama 16 tahun BB tak ada yang mengurusinya. Sejumlah kolektor besar membeli gedung ini untuk dirata-tanah, dan dibangun gedung baru multifungsi, dengan menyediakan ruang seni bernama “Balai Budaya” sebagai heritage. (*Kompas*, 2 Januari 2015)

Kelima, periode 2014–sekarang. Beberapa seniman dan budayawan muda membentuk Badan Pengelola BB. Yang ditunjuk sebagai pimpinan adalah seorang pelukis, Cak Kandar. Langkah itu ditempuh karena ketika memasuki tahun 2014, kondisi BB banyak diberitakan melalui media cetak dan elektronik mengenai kondisi BB yang semakin parah. Atas inisiatif Cak Kandar sebagai salah satu anggota “Tim 5” yang



masih aktif dan didukung oleh seniman lainnya seperti Sri Warso Wahono, Syahnagra Ismail, Aisul Yanto, Fajar Sidiq, dll, me-

Cak Kandar (Wikipedia)

lakukan pendekatan kepada Abas Alibasjah sebagai Ketua “Tim 5” guna membahas masalah BB yang semakin parah keadaannya.

nya.

Menurut Cak Kandar, karena telah tiga kali keinginan bertemu dengan Ketua “Tim 5” itu mengalami kendala, maka kelompok seniman muda tersebut mengambil inisiatif melakukan upaya penyelamatan BB. Upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan di BB seperti pameran lukisan, diskusi, dan pendekatan ke berbagai instansi antara lain Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pemda DKI

Jakarta, Badan Kerja sama Kebudayaan/Kesenian Indonesia (BKKI) dll. Secara berangsur-angsur gedung BB mulai menggeliat.

Pembentukan Badan Pengelola Balai Budaya menjadi pilihan karena melalui badan baru dan pengurus baru akan dapat merealisasikan tujuan menyelematkan keberadaan situs dan bangunan BB sebagai bangunan cagar budaya dan membangunkan kembali aktivitas BB. Adapun susunan pengurus Badan Pengelola Balai Budaya itu adalah sebagai berikut.

- **Dewan Pakar dan Penasihat:**

1. Leon Agusta
2. Sri Warso Wahono
3. Remmy Sylado
4. Zawawi Imron
5. Tommy Awuy
6. Prof. Edi Sedyawati
7. Prof. Mudji Sutrisno.

- **Dewan Kurator:**

1. Sri Warso Wahono
2. Remmy Sylado
3. Aisul Yanto
4. Agung Frigidanto
5. Hardiman Radjab

- **Pengurus Harian:**

1. Ketua: Cak Kandar – Syahnagra Ismail;
2. Sekretaris: Aisul Yanto – KaNA
3. Bendahara: Laila Tifah – Idris Brandy

• **Bagian-bagian:**

1. Program: Okky Arfie H – Jaheng Jauhari
2. Litbang : Koko Rajasa – Berto Tukan – Fajar Sidiq
3. Pementasan: Yanto Lehonso - Suryadi

Sejak Badan Pengelola dibentuk para seniman muda telah berhasil menghidupkan kembali BB dengan menyelenggarakan sejumlah pameran. Pada tanggal 7 Februari 2015 diselenggarakan pameran lukisan karya H. Agus Salim, dengan lukisan “Bebek” yang dinilai sangat realistis bahkan terkesan naturalis seperti foto saja. Disusul kemudian pada tanggal 27 Maret 2015 Pameran 7 Pelukis: Aisul, Sudita Nashar, Sri Warso Wahono, Maria Tjui, Syafril Cotto, Syahnagra Ismail, Cak Kandar, dan A R Sudarta.

Panggal 13 – 21 Mei 2015 diselenggarakan pameran tunggal pelukis Sri Warso Wahono ke-18. Pameran yang dibuka oleh Arswendo Atmowiloto itu bertema: Menghidupkan kembali keberadaan Balai Budaya yang beberapa tahun “tertidur”. Dalam sambutannya Arswendo dengan gaya santai tetapi serius mengajak semuanya untuk menyelamatkan BB.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2015 ini diselenggarakan pameran seni lukis bertema “Lukisan Perempuan dalam Lingkaran”. Selain pameran, juga diselenggarakan acara diskusi dan lelang lukisan. Melalui langkah-langkah seperti di atas, roda BB perlahan-lahan berputar. Pengurus Badan Pengelola

dapat membayar tagihan listrik, air dan biaya kebersihan dan uang lelah petugas BB.

Dengan surut dan bubarnya BMKN, kondisi BB menjadi semakin tidak terurus. Upaya menghidupkan kembali BMKN dan BB telah disarankan oleh Arief Budiman tahun 1968, maupun yang disarankan Alfons Taryadi tahun 1978 dan tokoh lainnya, tidak mampu mengurai permasalahan yang dihadapi BMKN. BMKN benar-benar memasuki masa surut dan akhirnya bubar dengan sendirinya. Dengan bubarnya BMKN keberadaan BB juga semakin memprihatinkan.

BAB VIII

CATATAN PENUTUP

Menutup paparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa situs dan gedung BB bukan hanya memiliki nilai penting dari sisi benda (*tangible*) tetapi yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai budaya, sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan (*intangible*). Di dalam gedung yang tampak sederhana dan mungkin terlalu sederhana itu telah lahir berbagai konsep, kebijakan dan strategi dalam membangun kebudayaan bangsa. Suatu warisan yang akan terus direnungkan dan diperdebatkan oleh generasi-generasi penerus.

Selain itu, ada baiknya pula ditampilkan beberapa catatan untuk dijadikan bahan renungan bersama mengenai keberadaan BB. Sebagaiinggalan budaya masa lalu, BB telah berjasa dan berperan banyak dalam ikut membangun keindonesiaan di bidang kebudayaan.

Untuk melindungi dan menyelamatkannya perlu dilakukan kajian untuk dijadikan bahan penetapan sebagai bangunan cagar budaya. Mengenai status pemilikan hak atas gedung BB, ketiga pihak dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak BMKN/BB sebagai pemakai dan pihak Pemda DKI sebagai tempat ber-

dirinya gedung BB, dari segi legalitas kepemilikan tanah dan bangunan serta hak penggunaannya sama-sama tidak memiliki bukti. Tidak ada dokumen resmi yang dapat membuktikan tentang hak masing-masing pihak.

Selanjutnya, dari hasil penelusuran mengenai status pemilikan dan pemakai gedung BB menjadi semakin jelas. Berdasarkan pada laporan rapat BMKN dan majalah Warta Kebudayaan tahun 1954, yang memuat pidato Ketua Badan Pekerja BMKN R. Gaos Hardjosoemantri, dan pidato Menteri PP dan K Moh. Yamin menyebutkan gedung BB dibeli oleh BMKN dengan uang yang berasal dari subsidi pemerintah, dalam hal ini Kementerian PP dan K. Setelah itu, pihak Kementerian PP dan K menyerahkan hak pemakaiannya kepada BMKN tanpa ada batas waktu. Ke depan, kesepakatan itu seyogyanya dipertahankan.

Oleh karena itu, perlu ada langkah penataan ulang dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) mengenai hak masing-masing sebagai pemilik dan pemakai. Keberadaan BMKN/BB pada zaman itu statusnya diposisikan sebagai lembaga semi pemerintah (*quasi government*), yakni sebuah lembaga independen tetapi untuk dana operasional dan peralatan teknis didukung dengan dana bantuan, subsidi atau pun hibah.

Dalam hal ini dukungan dana operasional dan peralatan itu dapat datang dari Kementerian PP dan K, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dunia usaha dan instansi lainnya. Untuk masa depan status itu sedapat mungkin diperlakukan sama seperti pada

zamannya, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam rangka mendapatkan dukungan dana itu perlu dipertimbangkan untuk memberi peluang kepada Badan Pengelola untuk menggali sumber dana atas usaha sendiri. Untuk itu perlu pula dipertimbangkan kemungkinan membentuk organisasi atau lembaga seperti BMKN untuk mendampingi Badan Pengelola yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pegangan dalam melakukan usaha.

Bagian penting lain yang perlu dilakukan adalah memantapkan status Badan Pengelola Balai Budaya yang sudah dibentuk, badan itu perlu dikukuhkan statusnya, dalam hal ini oleh menteri yang mengurus bidang kebudayaan. Badan Pengelola seyogyanya selain beranggotakan wakil-wakil dari seniman, budayawan dan cendekiawan, ditambah dengan tokoh masyarakat dan unsur pemerintah pusat dan daerah.

Penting pula direnungkan untuk kemungkinan mengabadikan nama R. Gaos Hardjasoemantri setelah bangunan BB direstorasi dan menjadi sebuah bangunan baru, dengan nama "*Balai Budaya R. Gaos Hardjasoemantri*". Sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN telah berjasa besar dalam mengantarkan BMKN dan Balai Budaya berperan banyak dalam memajukan kebudayaan bangsa.

Untuk lebih mengaktualkan kehadiran BB sesuai dengan perkembangan zaman, perlu dilakukan pena-

taan ulang dalam hal visi, misi dan fungsi serta tata pengelolaannya. Seyogyanya diselenggarakan dialog, diskusi atau seminar untuk membahas hal itu dengan melibatkan seniman budayawan, dan cendekiawan, terutama dari kalangan muda.

Terakhir, kondisi bangunan BB yang menghadapi keruntuhan itu perlu diselamatkan. Perlu dilakukan pemugaran dan perluasan bangunan dengan tanpa meninggalkan data dan nilai bangunan aslinya. Pemugaran itu tentu tidak hanya sebatas fisik bangunannya saja. Yang lebih penting adalah merestorasi dan merevitalisasi nilai yang terkandung di dalamnya. BB sedapat mungkin kembali menjadi sebuah “sentrum” untuk pengembangan kebudayaan bangsa seperti pada zamannya.

Demikian beberapa catatan yang dapat dihimpun dari berbagai sumber tentang “Balai Budaya Riwayatmu Dulu, Kini, dan Esok”. BB yang dulu berkarya dengan penuh vitalitas, kini yang terseok, esok akan kembali bangkit.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Kemanggisan, 19 Agustus 2015

Lampiran:

Tabel 2
DAFTAR KEGIATAN KEBUDAYAAN LKI, BMKN DAN BALAI
BUDAYA (1948-2015)

TA-HUN	KEGIATAN	BULAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1948	<ol style="list-style-type: none"> Rapat persiapan Kongres Kebudayaan di Magelang Kongres Kebudayaan Indonesia di Magelang Bedirinya Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) Peresmian berdirinya LKI 	<ol style="list-style-type: none"> 6 Mei 1948 20-25 Agustus 1 Januari 1949 9 Maret 1950 	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Bahder Djohan, Mr. Wongsonegoro, dll Lembaga Kebudayaan Kedu Peserta kongres Ketua, Mr. Wongsonegoro
1949	<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan Majalah Indonesia Th. I No. I. 	<ol style="list-style-type: none"> - 	<ol style="list-style-type: none"> BMKN
1950	<ol style="list-style-type: none"> Surat Kepercayaan Gelanggang Konferensi Kebudayaan Indonesia di Jakarta Bedirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) 	<ol style="list-style-type: none"> 18 Februari 5-7 Agustus 1950 17 Agustus 1950 	<ol style="list-style-type: none"> Chairil Anwar, Rivai Apin,... Dr. Bahder Djohan Pramudya Ananta Toer
1951	<ol style="list-style-type: none"> Kongres Kebudayaan di Bandung Menerbitkan majalah INDONESIA No. 1 s/d 6-12 Tahun 1951 Menerbitkan kumpulan sajak SUARA 	<ol style="list-style-type: none"> 6-11 Oktober 1951 - - 	<ol style="list-style-type: none"> LKI LKI dan BMKN BMKN/Toto Sudarto Bachtiar
1952	<ol style="list-style-type: none"> Konferensi Kebudayaan Indonesia di Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 12-14 April 1952 14 April 1954 	<ol style="list-style-type: none"> LKI LKI

2. Lahirnya Badan Masyarakat Kebudayaan Nasional (BMKN)	3. 14 April 1952	3. BMKN
3. Sidang Pleno I BMKN	4. 12 Mei 1952	4. LKI
4. LKI meleburkan diri ke dalam BMKN.	5. 8-9 Mei	5. BMKN
5. Sidang Pleno II BMKN	6. 13-14 Juli	6. BMKN
6. Sidang Pleno III BMKN	7. 23 Agustus	7. BMKN
7. Pengesahan Anggaran Dasar BMKN	8. 16-16 September	8. BMKN
8. Sidang Pleno IV BMKN	9. 16-17 November	9. BMKN
9. Sidang Pleno V BMKN	10. 18-19 Desember	10. BMKN
10. Sidang Pleno VI BMKN	11. Juni	11. BMKN
11. Pameran lukisan untuk penilaian Hadiah BMKN	12. -	12. BMKN
12. Menerbitkan majalah INDONESIA No. 1 - 12, Tahun 1952	13. -	13. BMKN/Gregoius Sidharta
13. Anugerah Seni Lukis	14. -	14. Mochtar Lubis, karya: Jalan Tak Ada Ujung
14. Hadiah Sastra Nasional BMKN	15. -	15. Utuy Tatang Sontani, karya: Awal dan Mira
15. Hadiah Sastra Nasional BMKN		

1953	1. Sidang Pleno VII BMKN	1. 12-13 Februari	1. BMKN
	2. Sidang Pleno VIII BMKN	2. 7 Maret dilanjutkan 21-22 Maret	2. BMKN
	3. Pameran Buku	3. 14 April	3. BMKN
	4. Sidang Pleno IX BMKN	4. 15-16 April	4. BMKN
	5. Sidang Pleno X BMKN	5. 18-19 Juli	5. BMKN
	6. Penilaian Hadiah BMKN	6. 17 Agustus	6. BMKN
	7. Sidang Pleno XI BMKN	7. 18-19 September	7. BMKN
	8. Pameran Reproduksi Lukisan berwarna	8. 15 Oktober	8. BMKN dan Jawatan Kebudayaan
	9. Sidang Pleno XII BMKN	9. 18,19-20 Oktober	9. BMKN
	10. Perayaan Memuliakan Lagu Indonesia Raya	10. 28 Oktober	10. BMKN
	11. Sidang Pleno XIII BMKN	11. 15-16 Desember	11. BMKN
	12. Pameran bersama	12. 5-12 De- seMBER	12. Bantuan dari BMKN
	13. Menerbitkan majalah INDONESIA No. 1-1 2 Tahun 1953	13. -	13. BMKN
	14. Hadiah Sastra Nasional BMKN	14. -	14. Pramudya Ananta Toer, karya: Tjerita dari Blora
	15. Hadiah Sastra Nasional BMKN	15. -	15. S. Rukiah, karya: Tandus

1954	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Pleno XIV BMKN 2. Sidang Pleno XV BMKN 3. Berdirinya Balai Budaya 4. Sidang Pleno XVI BMKN 5. Pedoman Pemakaian Balai Budaya 6. Sidang Pleno XVII BMKN 7. Penyusunan Laporan Rapat Umum BMKN 1954. 8. Kongres Kebudayaan di Surakarta 9. Sidang Pleno XVIII BMKN 10. Ceramah Hasil Kunjungan BMKN ke Muang Thai 11. Menerbitkan majalah INDONESIA No. 1-1 2 Tahun 1954 12. Pameran lukisan 13. Pameran lukisan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 dan 6 Februari 2. 3 Maret 3. 14 April 1954 4. 15 April 5. 27 April 6. 12 Mei 7. 31 Juli 8. 18 - 23 September 1954 9. 9 Juli 10. - 11. - 12. 20-27 November 1954 (atau 1958?) 13. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMKN 2. BMKN 3. BMKN 4. BMKN 5. BMKN 6. BMKN 7. Badan Pekerja BMKN 8. BMKN 9. BMKN 10. BMKN/ Dr. Bahder Djohan 11. BMKN 12. Pameran Lukisan Mahasiswa IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia), Srihadi ,Popo Iskandar, Achmad Sadali, Hetty Udit, Karnedy, But Muchtar, Sie Hauw Tjong, Soebhacto, Soedjoko, Edie Kartasoebarna, dan Kartono Yudho-kusumo 13. Sjahri
1955	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran Lukisan 2. Simposium Bahasa Sunda 3. Hadiah Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- 2.- 3.- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran Lukisan Affadi 2. Lembaga Bahasa jeng Sastra Sunda 3. Mochtar Lubis, karya

	Nasional BMKN 1955-1956		Perempuan
	4. Pameran "Batik Indonesia"	4. 21-25 Desember	4. BMKN dan Go Tik Swan (Solo) dan bantuan Kementerian Penerangan, dihadiri oleh Bung Karno
1956	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran BMKN tentang Kesan-kesan Richard Wright 2. Pameran tunggal 3. Pameran tunggal 4. Pameran tunggal 5. Diskusi tentang "Cabul" 6. Konser Pelajar 7. Pembukaan Latihan Melukis 8. Ceramah kebudayaan 9. Hadiah Sastra Nasional BMKN 10. Hadiah Sastra Nasional BMKN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15 Mei 2. 21 September- 4 Oktober 3. 1956 4. - 5. 26 Oktober 6. 28 Oktober 7. 22 Juni 8. - 9. - 10. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMKN 2. Salim 3. Batara Lubis 4. Rusli 5. Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) 6. BMKN/Binsar Siptompul 7. Pengajar: Oesman Effendi dan Zaini 8. Antara lain oleh: Trisno Sumardjo, Ajip Rosidi, O. Effenedi, Pramudya Ananta Toer, dll 9. Taslim Ali, terjemahan Puisi Dunia 10. Toto Sudarto Bachtiar, karya: Suara
1957	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah Kesan-kesan Perjalanan ke RRT 2. Pertemuan dengan seniman Cekoslovakia 3. Pameran Lukisan 4. Pameran tunggal 5. Pameran tunggal 6. Kongres Kebudayaan di Bali 7. Terbitan Almanak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Januari 1957 2. 17 Januari 3. 20-24 Juli 1957 4. - 5. - 6. 20-24 Juli 7. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pramudya Ananta Toer 2. BMKN 3. Alibasjah dan G. Sidharta Sugijo 4. Mardian 5. Affandi 6. BMKN 7. BMKN

	Seni 1957		
	8. Kalender Kesenian 1957	8. -	8. BMKN
	9. Hadiah Sastra Nasional BMKN	9. -	9. Achdiat Kartami-hardja, karya: Kere-takan dan Kete-gangan
	10. Hadiah Sastra Nasional BMKN	10. -	10. HR. Bandaharo, karya: Dari Daerah Kasih dan Lapar
	11. Hadiah Sastra Nasional BMKN	11. -	11. Pramudya Ananta Toer, karya: Tjerita dari Djakarta.
	12. Hadiah Sastra Nasional BMKN	12. -	12. Ajip Rosidi, karya: Sebuah Rumah buat Hari Tua.
1958	1. Pameran lukisan 2. Hadiah Sastra Nasional BMKN	1. - 2. -	1. 12 seniman " Seni Abstrak Bandung" 2. Toto Sudarto Bachtian, karya: Etsa
1959	Pameran lukisan	Desember	Srihadi dan But Muchtar
1960	1. Kongres Kebudayaan di Bandung. 2. Surat dukungan pada Manipol-Usdek kepada Presiden Sukarno 3. Surat Pernyataan BMKN 4. Surat Pernyataan itu dikirim kepada PYM Presiden Sukarno 5. Ceramah "100 Tahun Shoupen Houer". 6. Hadiah Sastra Nasional BMKN 7. Hadiah Sastra Nasional BMKN 8. Hadiah Sastra Nasional BMKN	1. 16-20 Juli 1960 2. 20 Juli 3. 27 Setember 4. 13 Oktber 1960 5. 22 Oktober 6. - 7. - 8. -	1. BMKN 2. BMKN 3. BMKN 4. BMKN, surat No. 977/III/1960 5. Wiratmo Sukito 6. Trisno Juwono, karya: Laki-Laki dan Mesiu. 7. Toha Mochtar, karya: Pulang 8. Ramadhan KH, karya: Priangan si Jelita

	9. Hadiah Sastra Nasional BMKN 10. Hadiah Sastra Nasional BMKN 11. Hadiah Sastra Nasional BMKN	9. – 10. – 11. -	9. Utuy Tatang Sontani, karya: Saat yang Genteng 10. Moh. Rustandi Kartakusumah, karya: Merah Semua Merah 11. Nasjah Djamin, karya: Titik-titik Hitam
1961	1. Pameran Pelukis Kontemporer Indonesia 2. Terbitnya majalah Sastra 3. Pameran tunggal		1. Widayat 2. HB Jassin 3. Suminto
1962	1. Pameran bersama "Sanggar Bumi Tarung"		1. Misbach Tamrin, Djoko Pekik, Amrus, Gultom, Nyoman Sukerta
1963	Pernyataan, Manifes Kebudayaan	17 Agustus	BMKN dan para pendukung Manifes Kebudayaan
1964	1. Konferensi Karyawan Pengarangan se-Indonesia (KKPI) 2. Manifes Kebudayaan dilarang 3. Rapat-rapat pasca pelarangan Manifes Kebudayaan	1. 1-7 Maret 2. 8 Mei 3. -	1. BMKN, majalah Sastra, Lesbumi, kelompok netral. 2. Presiden Sukarno 3. BMKN
1965	Pameran tunggal		Suminto
1966	1. Pameran 2. Rapat-rapat 3. Terbitnya majalah Horison 4. Pameran tunggal	1. 13-22 Desember 2. – 3. – 4. -	1. Sebelas Pelukis Bandung 2. Para pemuda dan mahasiswa untuk demonstrasi 1966 3. Majalah Horison berkantor di Balai Budaya 4. Suminto
1967	Pameran lukisan		Jeihan Sukmantoro
1968	1. Diskusi Kritik Sastra	1. 26-28 Oktober 1968	1. Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan 2. Diresmikan oleh

	<p>2. Berdirinya Taman Ismail Marzuki</p> <p>3. Rapat Badan Pembina Kebudayaan (Dewan Kesenian Jakarta)</p> <p>4. Peresmian purna pugar Balai Budaya</p> <p>5. Pameran tunggal</p> <p>6. Pameran bersama</p> <p>7. Pentas drama berjudul "Antara Dua Perempuan" karya Alice Gerstenberg</p>	<p>2. 10 November</p> <p>3. -</p> <p>4. -</p> <p>5. -</p> <p>6. -</p> <p>7. 28 dan 29 Oktober 1968.</p>	<p>Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin</p> <p>3. Trisno Sumardjo</p> <p>4. Gubernur Ali Sadikin</p> <p>5. Jeihan Sukmantoro</p> <p>6. Sepuluh 10 pelukis Wanita, Bandung, Bali, Jakarta" a.l. Erna Pirous</p> <p>7. Teater Populer, Teguh Karya</p>
1969	1. Pameran tunggal		2. Suminto
1970			
1971			
1972	1. Ceramah Sastra "Corak dan Cacat Novel Indonesia Mutakhir"	1. 4 Maret 1972	1. Goenawan Muhamad
1973	<p>1. Seminar</p> <p>2. Pembacaan ikrar</p>	<p>1. 30 November</p> <p>2. 30 November</p>	<p>1. Tema: "Untung Rugi Modal Asing di Indonesia".</p> <p>2. Ikrar Warganegara Indonesia</p>
1974	Rapat-rapat		Pencetusan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari)
1975			
1976	<p>1. Pameran bersama <i>Pameran Concept, New Art Movement</i></p> <p>2. Pameran Tunggal</p> <p>3. Pameran bersama</p> <p>4. Pameran tunggal</p>	<p>1. 23-28 Agustus 1976</p> <p>2. -</p> <p>3. -</p> <p>4. -</p>	<p>1. Pameran 4 Pelukis Muda Bandung</p> <p>2. FX Harsono</p> <p>3. AD Pirous, Abas Alibasjah,dkk</p> <p>4. Dede Eri Supria</p> <p>5. Agusjaya dan</p>

	5. Pameran bersama	5. -	Ottojaya
1977	1. Pameran 2. Pameran bersama 3. Pameran tunggal		1. Mustika 2. Arfial Arsad, Tarmizi Firdaus, Lilik Soemardjito, Sunarto, Surya Yuga 3. AA. Arnawa
1978	1. Pameran presentasi, berupa rekaman-rekaman peristiwa dan protes sosial.	2. 17 - 21 januari 1978	1. Sekolah Tinggi Seni Rupa "ASRI" Yogyakarta
1979	1. Pameran tunggal	1. -	1. S. Sudjojono
1980	1. Pameran tunggal ke tiga 2. Pameran Bertujuh		1. Godod Sutejo 2. Godod Sutejo dkk
1981	1. Pameran bersama Foto Seni SAPANTA V		1. Godod Sutejo dkk
1982	2. Pameran tunggal	2. -	2. S. Sudjojono
1983	Pameran Senirupa	18-24 Maret 1983	Karya SAGOTRA
1984	1. Pameran kaligrafi Islam 2. Pameran tunggal		1. Amang Rahman 2. S. Sudjono
1985	1. Pameran lukisan 2. Pameran lukisan		1. I Nyoman Erawan 2. Dadang Mochamad Achjar
1986	1. Pameran dan peresmian 2. Penyerahan buku sebanyak 3 peti buku dihibahkan ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di TIM	1. 14 Januari 2. Sekitar Januari	1. Peresmian Galeri Balai Budaya oleh Mochtar Lubis 2. Pengurus BB
1987	1. Dual Exhibition 2. Pameran bersama Pilihan Balai Budaya		1. JB Iwan Sulisty, dan S. Sorentoro 2. Godod Sutejo dkk.
1988	The 6 Senen Painters Exhibition		Andi Suandi
1989			
1990	1. "Exhibition with Group of 9" 2. Pameran lukisan 3. Pameran Kelompok Lima Pelukis Muda		1. JB Iwan Sulisty 2. Acep Zamzam Noor dan Agus Djatnika), 3. Ahmad Syahri, dkk

	Jakarta		
1991	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5th Sanggar Kamboja Painting Exhibition 2. Pameran Dialog 6 3. Pameran Seni Grafis 		<ol style="list-style-type: none"> 1. JB Iwan Sulistyo 2. Pranoto 3. Firman Lie
1992	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran lukisan 2. Pameran lukisan 3. Pameran lukisan 4. Pameran lukisan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 s/d 15 Feb. 1992 2. - 3. 23-29 Nov. 1992 4. 7 s/d 13 Nov. 1992 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran bersama 'Paras Realitas' 2. Sonny Lengkong 3. Pameran lukisan "tujuh pesona wanita" 4. Duo Odji (Lirungan) & Samadai Adam
1993	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran Gebyar Seni 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranoto
1994	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran lukisan 2. Lima ritme pelukis Surabaya 3. Pameran 4. Pameran Lukisan 5. Pameran lukisan 6. Pameran Tiga Pelukis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 18-24 April 2. 14-20 Juli 1994 3. 19/11- 3/12 4. - 5. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahyoe Wijaya 2. Andreanus Gunawan, Catur Nugroho, Soemarno, Sukarno MS., Wadjie MS 3. The Bali - Jakarta Group Exhibition 4. Untaian Seni & Kepedulian 5. Irwan Widjayanto, "Pelangi Akhir Tahun" 6. Sahat Simatupang
1995	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran lukisan 2. Pameran Lukisan "Empat Pribadi 3. Surabaya Delapan Menguak Warna 4. Pameran lukisan 5. Pameran 2 generasi pelukis realis. 6. Pameran lukisan 7. Pameran lukisan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 13-19 Maret 2. Juli 3. 6-12 Desember 1995 4. 20-26 November 5. 3-9 Oktober 1995 6. - 7. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enam Warna 2. Agus Wakidi, Yudha Iswari, Piet H. Santoso & A.M. Emmi Ratih 3. Pinardi, dkk. 4. Dan Hisman 5. Sambodja & Robby L 6. AS Kurnia 7. Odji Lirungan dan "Group exhibition"

1996	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran 2. Pameran Cat air 3. Pameran tunggal 4. Pameran tunggal 5. Pameran Tunggal 6. Pameran tunggal 	16-26 Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelukis Budi Karmanto 2. Irwan Widjayanto 3. Odji Lirungan 4. Sahat Simatupang 5. Najib Amrullah 6. Pameran 'Pelukis Muda Jakarta'.
1997	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran lukisan 2. Pergelaran wayang kulit 3. Pameran tunggal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelangi '978 pelukis Ubud 2. Memeringati 75 tahun H. Budiardjo, dengan lakon Salyo Begal ciptaan H. Budiardjo, oleh dalang Manteb Sudarsono. 3. Najib Amrullah
1998	Pameran		Pameran Temu Ragam
1999	Pameran bersama	7-17 Januari	Abas Alibasyah, Bambang Ariyanto, Elise L Adiarsa, Noer Mass, Cak Kandar, Soesetio, Dicky Maringka, Threes SM, Dudut Panuluh, Yuriah Tanzil
2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran lukisan 2. Pameran tunggal 	1. 27 Juni - 3 Juli 2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10 warna pelukis Ubud-Bali 2. Najib Amrullah
2001	The Group Exhibition of HIPTA		Andi Suandi
2002			
2003	Pameran tunggal lukisan	17-23 September 2003	Neneng Ferrier
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010	Pameran lukisan	April 2010	Pameran Energy 3, Kuss

			Indarto
2011			
2012			
2013	Pameran Jong JakArt Save Balai Budaya		Laila Tifah
2014	1. Pameran 2. Pameran 3. Pameran bersama 4. Pameran "Semangat Pegringsingan", 5. Pameran	1. 18 Juli 2014 2. November 2014, 3. 27-30 Des 2014 4. 21-28 Agustus 5. 28 Agustus 2014	1. Patck Wowor 2. Pelukis Sri Warso Wahono 3. Pameran 34th KMPF UNJ "R34LITAS" 4. Sanggar Bunga Matahari, Denpasar, Bali 5. Pelukis Djoko Sutrisno dan 12 pelukis dengan tema "Sanggar Pengasingan
2015	1. Pameran 2. Pameran 3. Pameran 4. Pameran 5. Pameran 6. Pameran Tunggal Bingkai Koran 7. Pameran tunggal	1. 17-27 Januari 2015 2. 7--15 Februari 3. 25/5 - 31/5 4. 31 Juli - 7 Agustus 2015 5. 26 Maret 2015 6. 16-26 Juni 7. 12-21 Mei	1. The New Dimension Exhibition H Agus Salim dan Jaka Espe 2. Kelompok Perupa Alim Solo Raya bertajuk Citra Solo 3. 10 wanita pelukis:Tuti Nusandari, Maria Giri Pratiwi, Gerardika Meitaurisa, Yunti Tavip, Yvonne De Fretes, Ariana Restu Handari (Jakarta), Ferita Tompini (Jambi), Sekartaji Suminto, Pandansari Kusumo (Yogyakarta), dan Susi Cahyani (Temanggung). 4. Maman PS 5. Budi Karnanto 6. - 7. Sri Warso Wahono

	8. Diskusi kecil	2015 8. 4 Agustus	8. Cak Kandar, Aisul Yanto, Syahnagra Ismail, Fajar Sidiq, Sri Warso Wahono, Nunus Supardi, Wawan Kurniawan
	9. Pura-pura dalam Rupa	9. 20-30 April 2015	9. Edi Markas, Toto Suu, Iwan Braso, Revoluta, M Pandhik, Sudjadiono, Marwan, dan Safa Fadli Zon.
	10. Pameran Lukisan bertajuk "Lintas Rupa"	10. 20-30 September	10. Limabelas oleh (15) pelukis dari Bali, Bandung, Jogja dan Jakarta

Dihimpun dari berbagai sumber. Ada beberapa tahun yang masih kosong, karena datanya belum ditemukan atau memang tidak ada kegiatan.

(nunussupardi/08/2015)



Atas: Mochtar Lubis membuka "Pavilion" atau "Galeri" Balai Budaya

Bawah: Hamsad Rangkuti sedang mengamati lukisan di Galeri Balai Budaya



Atas: sepotong papan nama sederhana dari Badan Musyawarat (masih ditulis “Musawarat”, tanpa huruf “j” atau “y”) Kebudayaan Nasional (BMKN)

Bawah: plakat atau prasasti bantuan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta merenovasi gedung Balai Budaya.



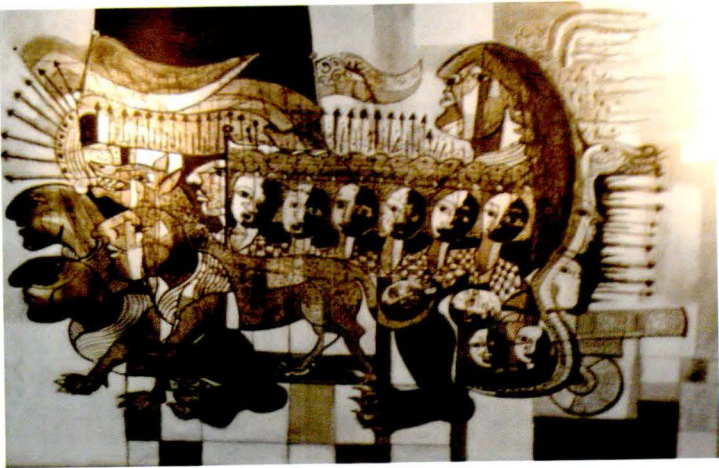
Kondisi ruang pameran Balai Budaya



Atas: Pameran lukisan bersama 'Paras Realitas', Balai Budaya, Jakarta, 9 s/d 15 Februari 1992. Bawah: Pameran karya H Agus Salim dan Jaka Espe di Balai Budaya Jakarta, 7-15 Februari 2015.



Arswendo Atmowiloto dan Sri Warso Wahono, selesai peresmian pembukaan pameran tunggal bertajuk “Rampogan”





Pameran Tujuh Pesona Wanita di Balai Budaya

Bahan bacaan:

- Anwar, Achmad Syaiful, 2012. *Perkembangan Teater Kontemporer Indonesia 1968-2008* (Disertasi) Universitas Indonesia.
- Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional, 1954. *Laporan Rapat Umum BMKN 1954*.
- , Warta Kebudayaan 1954
- , Warta Kebudayaan, 1956
- Budiman, Arief, 2006. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Fischer, Joseph (Ed). Jakarta and New York: Panitia Pameran KIAS(1990-91) and Festival of Indonesia; Helena Spanjaard, 1990; Bandung, *The Laboratory of the West? dalam Modern Indonesian Art: Three Generation of Tradition and Change 1945-1990*; hal 204
- Husen Daulay, Amir dan Imran Hasibuan/Ed., 2011. *Hariman & Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Q-Communication, Jakarta
- Irianto, Asmudjo J., *Abstrak Indonesia* di Salihara, 20 Februari 2010
- Kenneth M. George, *Politik Kebudayaan di Dunia Seni Rupa Kontemporer: A.D. Pirous dan Medan Seni Indonesia*, terjmh. Fadjar I. Thufail dan Atka Savitri (Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti, 2004), hlm. 37

- Moeljanto, DS dan Taufiq Ismail, 1995. *Prahara Budaya: Kilas-Balik Offensif LEKRA/PKI*, penerbit Mizan dan HU Republika, Jakarta
- Rosidi, Ajip, 2010. *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari*, Kepustakaan Populer Gramedia -----, 2008. *Hidup Tanpa Ijazah*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Rustopo, Prof. Dr. 2018. *Jawa Sejati: Otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*, Penerbit Ombak Yogyakarta
- Sukarno, kopi pidato pada Ulang Tahun Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia tanggal 16/4/1959 (Arsip Nasional).
- Supardi, Nunus, 2013. *Bianglala Budaya: 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta.
- Tempo, 2014. *Lekra dan Geger 1965*, percetakan KPG dan Tempo, Jakarta
- Wiwoho B. dan Banjar Chaerudin. 1990. *Memori Jenderal Yoga*, Jakarta: PT Bina Reka Pariwara.
- Yuke Ardhiati, 2005, *Bung Karno Sang Arsitek*. Komunitas Bambu, Jakarta.

Surat kabar:

- Harian Angkatan Bersenjata, 27/10/1968
- Harian *Kompas*, 23/5/1978
- Harian *Kompas*, 9/1/1986
- Harian Sinar Harapan, 14/1/1986
- Harian Pelita, 24/3/1986
- Suara Karya Minggu, 12/1/1986

Harian *Kompas*, 14/3/2004
Harian *Kompas*, 7/9/2004
Kompasiana, 16/1/2012
Harian *Kompas*, (21/1/ 2014
Koran Jakarta, 16/11/2014
Harian *Kompas*, 2/1/2015
Harian *Kompas*, 20/1/2015
Harian *Kompas.com*, 21/1/2015
Harian *Kompas* 21/1/2015
Harian *Kompas* 22/1/2015
Harian *Kompas* 23/1/2015
Harian *Kompas*, 6/8/2015
Harian *Kompas*, 7/8/2015
Harian *Kompas* 14/8/2015
Kompas.com, 14/8 /2015

Sumber Internet:

<http://membacaindonesia.blogspot.com/2011/06/membaca-balai-budaya-budaya-macam-apa.html>
<https://www.Selasar.com/budaya/balai-budaya-jakarta-kini-ter-lantar>).
<http://membacaindonesia.blogspot.com/2011/06/membaca-balai-budaya-budaya-macam-apa.html>
<http://blogsenvirupa.blogspot.com/2010/11/profil-pelukis-nashar.html>
http://pelukishardi.com/about-hardi.html#Vd_MNYtxmUk
<https://alwishahab.wordpress.com/2008/07/21/balai-budaya-yang-merana/>
<http://www.koran-jakarta.com/?24051-napas-cinta-demokras>

<http://www.seribukata.com/2012/01/mat-kodak-ente-pengen-jadi-wartawan-foto-kuncinya-curiosity-rasa-pengen-tahu/>)

INDEKS

A

- Abas Alibasjah, 33, 37, 53, 54, 55, 66, 89, 90, 91 dan 109
- Achdiat Kartamihardja, 2, 71, dan 106.
- Achmad Sadali, 62 dan 104
- Agus Salim, 95.
- Affandi, 36, 57, 67, 70 dan 105.
- Afrizal Malna, 51.
- Agus Darmawan T, 1, 60, 80, 91, dan 109.
- Aini Chalid, 75.
- Aisul Yanto, 31, 93, 95, dan 113.
- Ajip Rosidi, 2, 23, 47, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 85, 86, 105, 106, dan 122.
- Alfons Taryadi, 50 dan 96.
- Ali Sadikin (Bang Ali), 16, 26, 27, 49, 50, 55, 76, 86 dan 108.
- Ali Sastroamidjojo, 84.
- Alwi Shahab, 3, 34, dan 73.
- Anas Ma'ruf, 2, 71, 86, 88, dan 89.
- Arief Budiman, 47, 48, 53, 71, 75, 50, 55, 73, 77, 96, dan 121.
- Arifin C. Noer, 27 dan 51, 53.
- Ariko Andikabina, 52, 53.
- Armijn Pane, 2, 21, dan 69, 71.
- Arwah Setiawan, 69, 71.

Asiantoro, 33.

Aswi Marwan Adam, 77.

B

Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia, 12.

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN), vii, ix, x, xi, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 70, 76, 80, 82, 84, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 115 dan 121.

Badan Pekerja BMKN, 5, 15, 38, 39, 41, 46, 48, 84/ 83, 84, 86, 87, 88, 89, 98, 99 dan 104.

Badan Pengelola Balai Budaya, 3, 4, 32, 33, 54, 58, 59, 93, 94, 95, 96, dan 99.

Badan Pertanahan Nasional, 33.

Bahder Djohan, 21, 22, 101, dan 104.

Balai Budaya (BB), v, vi, vii, viii, ix, x, xi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, dan 100.

Bambang Bujono, 30, 31, dan 71.

Bambang Heriyanto, 91.

Barli, 68.

Basuki Tjahaja Purnama, 53.

Batavia Kunstkring, 7 dan 8.
Bengkel Teater, 72.
Bentara Budaya, 16 dan 58.
Bip-Bop, 72.
Biro Deviesen Perdagangan, 61.
Biro Perlengkapan Depdikbud, 37.
Boejoeng Saleh Poeradisastra, 72.
Budha Bar Restaurant, 7
But Muchtar, 62, 104, dan 106.

C

Christianto Wibisono, 27
Cak Kandar, 21, 53, 91, 93, 94, 95, 111, dan 113.
cagar budaya, 32, 53, 91, 93, 94, dan 97.
Chaerul Umam, 72.
Claire Holt, 64.

D

Daduk Jayakusumah, 73.
Darto Singo, 93.
Dede Eri Supria, 51 dan 108.
Dewi Fortuna Anwar, 92.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 32 dan 55.
Dinas Pelayanan Pajak, Pemda DKI Jakarta, 41.
Dewan Kesenian Jakarta, 74, 86 dan 89.

Dewan Pekan Raya dan Exhibisi Indonesia Pusat (DEXIP), 10 dan 16.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum (PCBM), 56 dan 57.

Djamaludin Joeda, 77.

Dorodjatun Kuntjorojakti, 74 dan 75.

E

Edie Kartasoebarna, 62 dan 104.

Edi Sedyawati, 10.

Eka Budianta, 71.

Eko Djatmiko, 75.

Ed Zulverdi, 27.

Emil Salim, 52.

Explanade Theatre, 16.

F

Fajar Sidiq, 93 dan 95.

Fikri Jupri, 75.

Fuad Hassan, 53.

G

Galeri Kemang, 16 dan 58.

Galeri Cemara, 16 dan 58.

Ganyang, 77.

Gaos Hardjasoemantri, x, xi, 5, 22, 25, 39, 40, 41, 48,
49, 83, 84, 88, 98 dan 99.
Gayus Siagian, 73.
Gelanggang Kebudayaan, 9 dan 12.
G30S/PKI, 2, 13 dan 48.
Go Tik Swan Hardjonagoro, 68, dan 69.
green belt, 15.
Gedung Kesenian, 7, 8, 10 dan 12.
Gedung Durian, 16.
Gregorius Sidharta Sugio, 67, 102 dan 105.
Goenawan Mohamad, 27 dan 73.
Gurmilang Kartasasmita, 75.

H

Hamka, 22.
Hamsad Rangkuti, 2, 51, 53, 76, 90 dan 91.
Hardi, 2 dan 71.
Hariman Siregar, 75.
Hetty Udit, 62.
Himpunan Pelukis Jakarta (HIPTA), 59 dan 111.
Horison, 30 dan 90.

I

I LAGA LIGO, 17 dan 18.
Ikatan Seni Tari Indonesia (ISTI), 10.
Ike Supomo, 53.
Ilen Surianegara, 91.

Intojo, 71.
Intangible, 97.

J

Jawatan Kebudayaan, 9 dan 10.
Jassin, HB, 2, 4, 38, 54, 73 dan 81.
Jesse A Monintja, 75.
Joko Widodo, 56.
Jusuf Kalla, 17.

K

Kacung Marijan, 60.
Karnedy, 62.
Kartono Yudhokusumo. 62.
Kebun Binatang Cikini, 28.
Kementerian Dalam Negeri, 33.
Kementerian Keuangan, 8 dan 16.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3, 4, 29, 30,
33, 36, 37, dan 55.
Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
(PP dan K), 5, 9.10, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 55, dan
98.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 85
dan 86.
Kementerian Penerangan, 39.
Kenneth M. George, 66 dan 121.
Konferensi, 3, 23, 65, 83, 87 dan 107

Konferensi Kebudayaan, 3, 21, 23, 83, 87 dan 101.
Kongres, 4, 8, 9, 11, 13, 22, dan 50.
Kongres Kebudayaan, 4, 5, 8, 21, 38, 39, 50, 54, dan
87.
Kubu Bandung, 64
Kubu Yogyakarta, 64
Kuntjoro Purbopranoto, 22.
Kusnadi, 72.
Kusnadi Prawirasumantri, 72.

L

Labes Widar, 92.
Laihad, J.M., 11.
Landmark, 14.
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), 2, 23, 78, 81, 84,
85, dan 86.
Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), 21, 22, 23, dan
24.
Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia
(Lesbumi), 84.
Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), 84.
Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi), 84.
Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia
(Laksmi), 84.
Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), 84.
Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK), 84.
Leon Agusta, 53.
Louis Wangge, 75.

Loods, 40.

Luthfi Asiaro, 54.

M

Madjlis Islam Alaa Indonesia (MIAI), 7.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS),
13.

Mangunsarkoro, Ki, 22.

Manifes Kebudayaan, 32, 43, 73, 78, 79, 80, 85, 88, dan
90.

Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), 75 dan 108.

Mara Karma, 51.

Marah Djibal, 91.

Mardian, 77 dan 105.

Maruli Panggabean, 73.

Marsilam Simandjuntak, 75.

Mazhab Bandung, 64.

Mazhab Yogyakarta, 64.

Megawati Soekarnoputri, 18.

Misbach Yusa Biran, 73.

Mochtar Lubis, 2, 45, 53, 74, dan 75.

Monumen Nasional (MONAS). 11.

Udji Sutrisno, 94.

Murasad, 22.

Murdowo, 22.

Mustika, 68, 77, dan 78.

N

Nashar, 2, 70, 77, 78, dan 95.

Nasjah Djamin, 71 dan 107.
Nasution, M., 22.
Nasakom, 79.
Nekolim, 79.
Nugroho Notosusanto, 73 dan 110.

O

Oesman Effendi, 2, 77, 78 dan 105.
Osa Maliki, 84.

P

Pasar Seni Ancol, 16 dan 58.
PELITA, 13.
Permana, E. 72
Piet Mondrian, 2, 34 dan 35.
plinthat-plinthut, 79.
point of interest“, 14.
Popo Iskandar, 62, 67, 72 dan 104.
Pramudya Ananta Toer, 2, 71, 101, 103, 105 dan 106.
Priatna Affiatin, 79.
Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, 4, 38 dan 53.
Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), 86
dan 89.
pavilion seni, 76.
Polemik, 2, 62, 78, 79 dan 81.

Q

quasi government, 96.

R

Rajab Ranggasuli, 91.
Ramadhan KH, 91 dan 106.
Rendra, WS, 2, 72 dan 88.
Remmy Silado, 91.
Remy Leimena, 75.
Ritul, 77.
Ronny Agustinus, 66.
Rosihan Anwar. 52.
Rusli, 51, 67 dan 105.
Rusman Sutiasumarga, 72.

S

Sahuri, 72.
Salim, 67 dan 105.
Salim Hutadjulu, 95.
Salim Said, 27.
Sanjata Vidjaja, 21.
Sanusi Pane, 2 dan 65.
Sapardi Djoko Damono, 2 dan 71.
Sarwedi Sosrosudigdo, 22.
Schouwburg, 7, 8, 10 dan 16.
Said, Moh, 22.

Syahnagra Ismail , 93.
Sie Hauw Tjong, 62.
Silaban, F, 15.
Sjah, Moh., 22.
Sekda, 59.
Sentrum, 61, 76, 77 dan 100.
Sides Sudiarto, 91 dan 92.
Simposium Bahasa Sunda, 71.
Sitok Srengenge, 92.
Slamet Rahardjo, 76
Sociëteit Harmonie, 8 dan 16.
Sociëteit Concordia, 8 dan 16.
Soebhakto, 62 dan 104.
Soedjoko, 62 dan 104.
Soe Hok Djien, 72.
Soekarno/ Bung Karno, 5, 11, 69, 70, 73, 79, 85, 105,
106, 107, 110, dan 122.
Srihadi, 10, 104 dan 106.
Sri Warso Wahono, 59, 93, 94, 95, 112, 113, 115 dan
118.
Sudjana Kerton, 67.
Sudjojono, S, 51, 52, 63, 67, dan 109.
Sudjatmoko, 2 dan 89.
Suhadi, 74.
Sukardjasman, 27.
Sunarjo Kolopaking, 21.
Suparmo, 71.
Sutan Takdir Alisjahbana, 2.
Sutardji Calzoum Bachri, 72.

Sutrisno. Ny., 92.
Suratno Sastroamidjojo, 22.
Spanjaard, Helena, 63 dan 121.

T

Taman Wijayakusuma, 9.
Taman Kebudayaan, 9.
Taman Raden Saleh, 28.
tangible , 97.
Tatengkeng, J.E., 2 dan 71.
Taufiq Ismail, 52, 73 dan 122.
Taufik Abdullah, 75.
Tim 5, 38, 56, 91 dan 93.
Teater Rakyat Terbuka (Volktheater), 10 dan 12.
Teater Tanah Air Taman Mini Indonesia Indah, 16.
Teater Salihara, 16.
Teater Mini Kata, 72.
Todung Mulya Lubis, 75.
Tomy Awuy, 92.
Trisno Soemardjo, 62, 71, 73, 89 dan 105.
Tugu Kunstkring Paleis Restaurant, 7.
Tugu Nasional, 11, 12 dan 14.
Trubus, 70.
Trytyakovskaya, 11.

U

Umar Khayam, 2 dan 73.

Usdek, 79.

Utuy Tatang Sontani, 72.

W

Wahyu Sihombing, 73.

Wahju Wbisana, 72

Warta Kebudayaan, x, 4, 40, 41, 48, 53, 55, 57, 81, 82,
98, dan 121.

Wilhelmina Park, 9.

Wilson, Robert, 17 dan 18.

Wongsonegoro, 11, 21 dan 101.

Wisma Seni Nasional, 14.

Wiratmo Sukito, 2, 73, 91 dan 106.

Y

Yamin, Moh., 4, 5, 25, 32, 39, 40, 41, 45, 61, 76, 80,
82, 83, dan 98.

Yayasan Turisme Indonesia, 10.

Yozar Anwar, 75.

Yuke Ardhiati, 11, 12 dan 122.

Yuwono Sudarsono, 75.

Z

Zaini, 2, 51, 73, 77 dan 105.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Setelah meraih gelar sarjana muda (1965), Nunus menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965—1973). Selama di Madiun, ia pernah mengajar di Sekolah Asisten Apoteker Madiun (SAA), PGSLP, dan IKIP PGRI. Baru kemudian tahun 1973 pindah ke Jakarta menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan.



Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan (1985-1993), Sekretaris Ditjen Kebudayaan (1993-1999), dan Direktur Purbakala (1999-2001). Setelah itu, ia dipercayai menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5/2—14/11/2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus memangku jabatan Sekretaris Utama Badan Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata (14/11/2001-1/9/2003).

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, di Badan Kerjasama Kebudayaan Indonesia (BKKI), salah satu pendiri Lingkar Budaya Indonesia (LBI) dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Dalam kurun waktu 2005--2008, ia menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) 2005-2008, dan Wakil Ketua LSF periode 2009--2014. Pengalaman lain, menjadi anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004-2009). Juga menjadi salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012, 2013, 2014 dan 2015.

Karya tulis yang sudah diterbitkan, a.l. Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud (1998), Persahabatan Indonesia-Jepang (1998), Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah (terjemahan, 2000), Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka (2003), Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi (2004), Kongres Kebudayaan 1918-2003 (Edisi Revisi. 2007), Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintahan Dari Masa ke Masa (2013), Bianglala Budaya: 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013(2013), Kementerian Kebudayaan: Impian Lama yang Belum Terwujud (2014) dan Memilih Hari Museum Indonesia (2015).

Kerja sama:

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Balai Budaya Jakarta

Badan Kerja sama Kebudayaan Indonesia (BKKI)